

**EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
(KB) DI GAMPONG DOY, KECAMATAN ULEE KARENG,  
KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:  
Rahmad Zuliansyah  
200802046**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M / 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmad Zuliansyah

NIM : 200802046

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 20 Oktober 2002

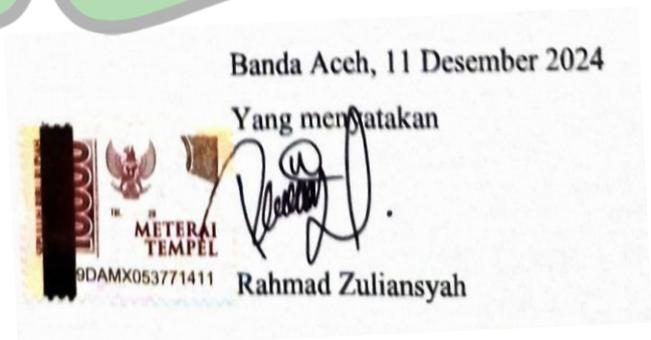
Alamat : Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri kaarya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**  
**(KB) DI GAMPONG DOY, KECAMATAN ULEE KARENG,**  
**KOTA BANDA ACEH**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**Rahmad Zuliansyah**

200802046

Mahasiswa Program Studi ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing



Dr. Saïd Amirulkamar, MM., M.Si

NIP. 196110051982031007

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**  
**EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**  
**(KB) DI GAMPONG DOY, KECAMATAN ULEE KARENG,**  
**KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal Sidang : Senin, 06 Januari 2025  
06 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

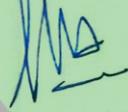
Ketua

  
Dr. Saïd Amirulkamar, MM., M.Si  
NIP. 196110051982031007

Sekretaris

  
Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si  
NIP. 199011192022031001

Penguji I

  
Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si  
NIP. 197802032005041001R - R A N I R Y

Penguji II

  
Cut Zamharira, S.IP., M.AP.  
NIP. 197911172023212012

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu inovasi program dari KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang bekerja sama dengan lembaga atau kementerian, mitra kerja atau pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat setingkat desa atau kalurahan. Berdasarkan observasi awal peneliti, terlihat bahwa efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh masih kurang maksimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya pelaksanaan program Kampung KB di Gampong Doy yaitu terkait dengan minimnya dana, sehingga program Kampung KB yang dilaksanakan masih ada beberapa program yang belum terselenggarakan dengan semestinya. Pelaksanaan program hanya beberapa saja sesuai dengan dana yang ada, akan tetapi pelaksanaan dari program Kampung Keluarga Berkualitas di Gampong Doy sudah mencapai kategori efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengukuran indikator efektivitas, yaitu indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Kesimpulan dari penelitian ini adalah minimnya dana yang tersedia, dan untuk pelaksanaan dari program Kampung Keluarga Berkualitas di Gampong Doy sudah mencapai kategori efektif.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pelayanan, Kampung KB, Kesejahteraan*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan Rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh”. Selanjutnya Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa dari alam jahiliah ke alam islamiah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang dirasakan pada saat ini.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.P.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
4. Cut Zamharira, S. IP., M.Ap. selaku penasehat akademik yang selalu memberikan masukan dalam menyelesaikan studi
5. Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.

7. Kepada informan yang telah memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua peneliti (Jarniadi & Mardiana) yang selalu menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada sahabat saya, Muhammad Fadhil Zainuddin S.T. yang telah banyak memberikan dukungan dan saran dalam penulisan skripsi.

Peneliti berusaha membuat yang terbaik dalam Penelitian skripsi ini, namun peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritikan, saran, dan masukan yang membangun, peneliti akan menerima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 11 Desember 2024

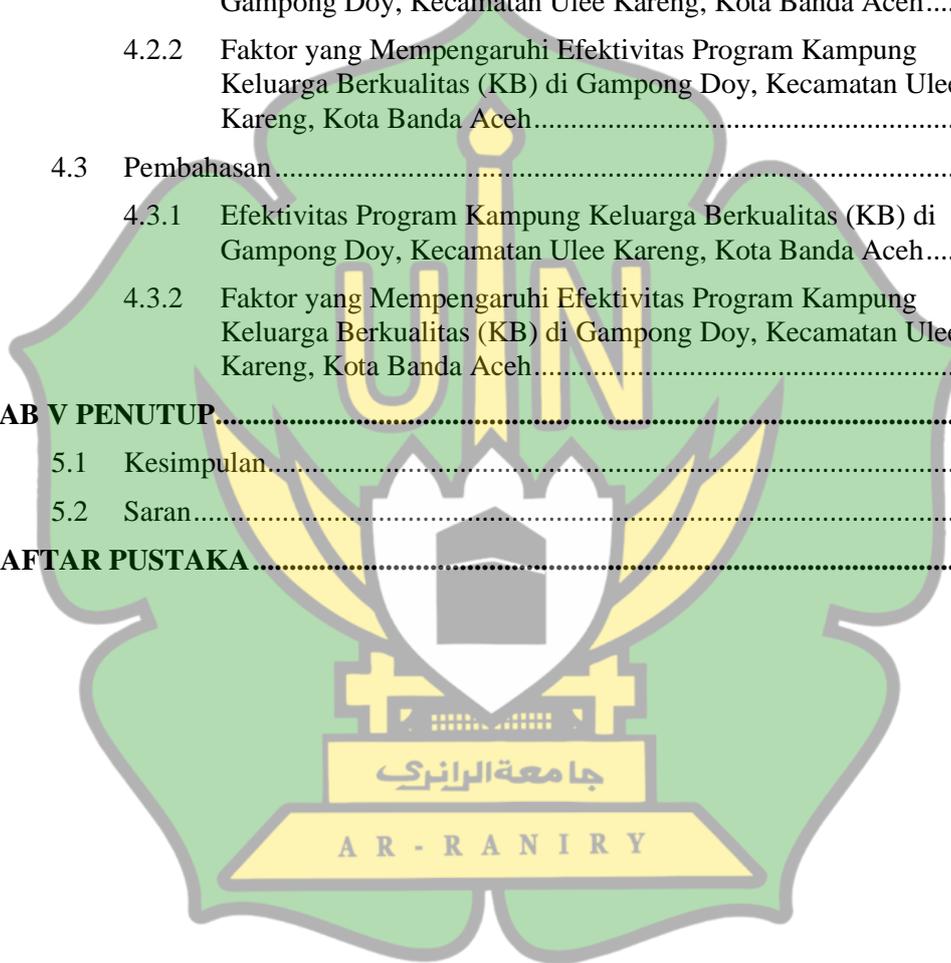
Rahmad Zuliansyah  
200802046



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>xi</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Teori Efektivitas .....	9
2.2.2 Teori Pelayanan.....	11
2.2.3 Konsep Pembinaan.....	13
2.2.4 Konsep Kampung KB.....	14
2.2.5 Konsep Kesejahteraan.....	17
2.2.6 Indikator Efektivitas.....	18
2.2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	22
3.2 Fokus & Indikator Penelitian .....	22
3.3 Lokasi Penelitian .....	23
3.4 Sumber Data.....	23
3.5 Informan Penelitian .....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	24
3.8 Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	26
4.1.1	Deskripsi Gampong Doy .....	26
4.1.2	Sejarah Pembangunan Gampong.....	26
4.1.3	Geografis Gampong Doy.....	31
4.1.4	Visi Dan Misi Gampong Doy.....	32
4.1.5	Sejarah Pemerintahan Gampong .....	33
4.1.6	Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Doy.....	35
4.2	Hasil Penelitian.....	36
4.2.1	Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.....	36
4.2.2	Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.....	48
4.3	Pembahasan.....	52
4.3.1	Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.....	52
4.3.2	Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>60</b>
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>61</b>



## DAFTAR TABEL

	Hal
<b>Tabel 3.1</b> Dimensi dan Indikator Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) .....	22
<b>Tabel 3.2</b> Dimensi dan Indikator Faktor yang mempengaruhi Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) .....	22
<b>Tabel 3.3</b> Data Informan .....	23
<b>Tabel 4.1</b> Sejarah Pembangunan Gampong .....	23
<b>Tabel 4.2</b> Dusun di Gampong Doy dan Luasnya .....	23
<b>Tabel 4.3</b> Sejarah Kepemerintahan Gampong Doy .....	23



## DAFTAR GAMBAR

	Hal
<b>Gambar 4.1</b> Peta Gampong Doy.....	31
<b>Gambar 4.2</b> Struktur Pemerintah Gampong Doy .....	35
<b>Gambar 4.3</b> Posyandu dan Bina Keluarga Lansia (BKL) .....	37
<b>Gambar 4.4</b> Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) .....	38
<b>Gambar 4.5</b> Rencana Kerja Masyarakat (RKM) .....	44
<b>Gambar 4.6</b> Sosialisasi Bahaya Narkoba .....	44
<b>Gambar 4.7</b> Regulasi .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 : Panduan Wawancara .....	64
Lampiran 2 : Surat Keputusan .....	65
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara.....	66
Lampiran 4 : Surat Penelitian .....	67
Lampiran 5 : Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas .....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia secara kuantitas saat ini mengalami perkembangan dengan cepat dan menyebabkan semakin tingginya jumlah pengangguran serta kemiskinan. Pada dasarnya adanya Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dapat bermanfaat pada perkembangan dan pembangunan masyarakat itu sendiri. Usaha untuk tetap melaksanakan program KB secara maksimal tentunya menjadi suatu hal yang mutlak bagi pemerintah sekarang ini.

Hal senada dengan program KB yang berorientasi pada gampong-gampong maka sebagai mana pendapat Muhammad Reza Dwikusmana menyebutkan bahwa:

“Program Kampung Keluarga Berkualitas pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat berimbas pada meningkatnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat, dengan semakin sejahteranya masyarakat maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat serta kemampuan memperbaiki taraf ekonomi serta pendidikan. Banyak sekali upaya yang dilakukan agar Program Kampung Keluarga Berkualitas ini dapat berjalan sebagai mana yang telah direncanakan dan mendapatkan dukungan serta partisipasi masyarakat”.<sup>1)</sup>

Indonesia belum lepas dari permasalahan kompleks yang berkaitan dengan kependudukan. Tidak hanya masalah kuantitas penduduk, tetapi juga terkait masalah kualitas, penyebaran dan mobilitas penduduk, serta data dan informasi kependudukan. Permasalahan lajunya pertumbuhan penduduk ini membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti permasalahan pendidikan, sosial, kesehatan, dan kemiskinan.

Pemerintah sudah berusaha melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi lajunya pertumbuhan penduduk yang terjadi, Aulia Nurbalqis menyebutkan bahwa:

“Demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui

---

<sup>1</sup> Muhammad Reza Dwikusmana, *“Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh,” (Doctoral Dissertation, IPDN), 2023.*

inovasi penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dibentuklah Kampung Keluarga Berencana. Pada tahun 2020. Secara historis Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengubah nomenklatur Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (KB).<sup>2)</sup>

Kampung KB menjadi model dan acuan pembangunan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Keluarga akan lebih bahagia dan sejahtera bila fungsi keluarga ini dimanfaatkan, terbebas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Kampung KB juga diharapkan akan memberdayakan masyarakat setempat dengan mengolah hasil alam atau mendorong kreativitas mereka, selain berfokus pada pembatasan jumlah keluarga.

Muhammad Alfathir menyebutkan bahwa “Pemerintah menargetkan kampung KB berkembang pesat disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 pemerintah menargetkan satu kampung KB disetiap kabupaten/kota hingga tahun 2019 pemerintah menargetkan terbentuknya satu kampung KB di setiap desa sangat tertinggal”.<sup>3)</sup>

Penduduk yang sangat tinggi menjadi masalah hampir di setiap daerah, Alkahfi Ersanda menyebutkan bahwa:

"Program kampung KB mulai dirintis pada tahun 2016 dan dirancang sebagai pola pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kampung KB. Prinsip pengelolaan kampung KB adalah dari, oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan pembangunan masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan untuk memberikan rangsangan dan kemudian masyarakat bertanggung jawab atas prosesnya. Pada awal terbentuknya Kampung KB, nama Kampung KB adalah Kampung Keluarga Berencana, namun sejak dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 843.4/2879/SJ tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas, nama Kampung Keluarga Berencana diubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Sejak kampung KB dicanangkan pada tahun 2017 hingga saat ini sudah ribuan kampung KB yang terbentuk. Setiap wilayah yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai wilayah kampung KB. Kampung KB mempunyai tujuan yang luas tidak hanya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga untuk

---

<sup>2</sup> Aulia Nurbalqis, Jamhur Poti, and Rudi Subiyakto, “Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 109–16.

<sup>3</sup> Muhammad. Alfathir, Khairulyadi, and Firdaus Mirza, “Kampung Kb Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penduduk (Studi Di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume.7, (2022): FISIP, USK.

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mewujudkan keluarga mandiri. Pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan 8 fungsi keluarga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2014 membagi fungsi keluarga menjadi delapan fungsi yaitu keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan. perkembangan. Untuk setiap fungsi keluarga dibentuk satu pokja yang tujuannya sesuai dengan fungsi keluarga yang ada”.<sup>4)</sup>

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang turut membentuk program Kampung KB. Hal tersebut tertera dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Vika Amalia juga menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Kota Banda Aceh merumuskan strategi untuk menanggapi permasalahan ini dengan melaksanakan Program KB yang coba disempurnakan melalui Program Kampung KB, kemudian menjadikan Program Kampung KB sebagai strategi dan berharap dengan adanya Kampung KB dapat menghidupkan kembali nilai dan peran Program Keluarga Berencana (KB) dengan mengendalikan kelahiran serta menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Pemerintah menjadikan program ini sebagai wadah atau tempat dalam mengajak dan mensosialisasikan pentingnya Program KB melihat situasi dan kondisi kependudukan negara saat ini”.<sup>5)</sup>

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh Cut Azharida, SH menjelaskan bahwa:

“Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Setidaknya saat ini Kota Banda Aceh telah memiliki 15 Kampung KB yang tersebar di sembilan kecamatan yaitu, Gampong Peuniti, Ulee Lheue, Gampong Mulia, Gampong Surien, Gampong Tibang, Gampong Deah Raya, Gampong Lampaloh, Gampong Jawa. Selain itu juga ada Gampong Suka Damai,

---

<sup>4</sup> Alkahfi Ersanda, “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas Tarandam Guna Menciptakan Keluarga Mandiri Di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat,” 2016, 1–23.

<sup>5</sup> Vika Amalia, “Efektivitas Program Kampung Kb Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,” 2022.

Gampong Lam Ara, Gampong Pande, Gampong Geuceu Kayee Jato, Gampong Doy, Gampong Lambhuk dan Gampong Lamjamee”.

Jumlah penduduk yang terus meningkat menjadi suatu masalah yang besar pada suatu negara. Vika Amalia menyebutkan bahwa:

“Kependudukan merupakan masalah nasional yang berdampak kepada masyarakat luas. Permasalahan kependudukan ialah suatu masalah serius yang dihadapi dunia, khususnya, negara berkembang. Laju pertumbuhan yang sangat tinggi merupakan masalah kependudukan yang mencemaskan negara dan hal ini sangat memengaruhi aspek-aspek kehidupan. Terkadang Jumlah penduduk yang besar tidak berimbang dengan kualitas penduduknya yang rendah. Hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan yang menimbulkan pengangguran dan menyebabkan kriminalitas, sehingga adanya penurunan kualitas masyarakat, banyaknya pemukiman yang tidak layak huni, polusi air dan udara, menipisnya sumber daya alam yang ada di dunia dan Global Warming”.<sup>6)</sup>

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Gampong Doy karena pada tahun 2017 Gampong Doy mendapat perhatian dari pemerintah Kota Banda Aceh dan ditunjuk sebagai salah satu peserta Program Kampung Keluarga Berkualitas oleh Walikota Banda Aceh karena memenuhi kriteria wilayah, dalam hal ini Gampong Doy menjadi daerah perkotaan miskin dan dijadikan Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pemberdayaan publik, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai berikut:

- 1) 50% Buruh Kasar (Tukang Bangunan)
- 2) 25% Pemerintahan
- 3) 25% Wirausaha<sup>7</sup>

Program Kampung KB ini mulanya di Gampong Doy menjadi suatu hal yang tabu bagi masyarakat, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa program Kampung KB ini hanya berdampak kepada pengurangan jumlah anak. Alfathir menyebutkan bahwa:

“dengan adanya sosialisasi yang dilakukan BKKBN mengenai program Kampung Keluarga Berencana, masyarakat Gampong Doy mulai memahami dan tertarik dengan program kegiatan yang diberikan. Gampong Doy mempunyai nama Kampung KB Melati. Kegiatan yang

<sup>6</sup> Vika Amalia, “Efektivitas Program Kampung Kb Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,” 2022.

<sup>7</sup> BKKBN

diberikan melalui program Kampung Keluarga Berencana di Gampong Doy berupa pemberdayaan masyarakat diantaranya di bidang agama, pendidikan, reproduksi, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan”.<sup>8)</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh masih kurang maksimal.
2. Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh masih terbatas

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor yang mempengaruhi efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

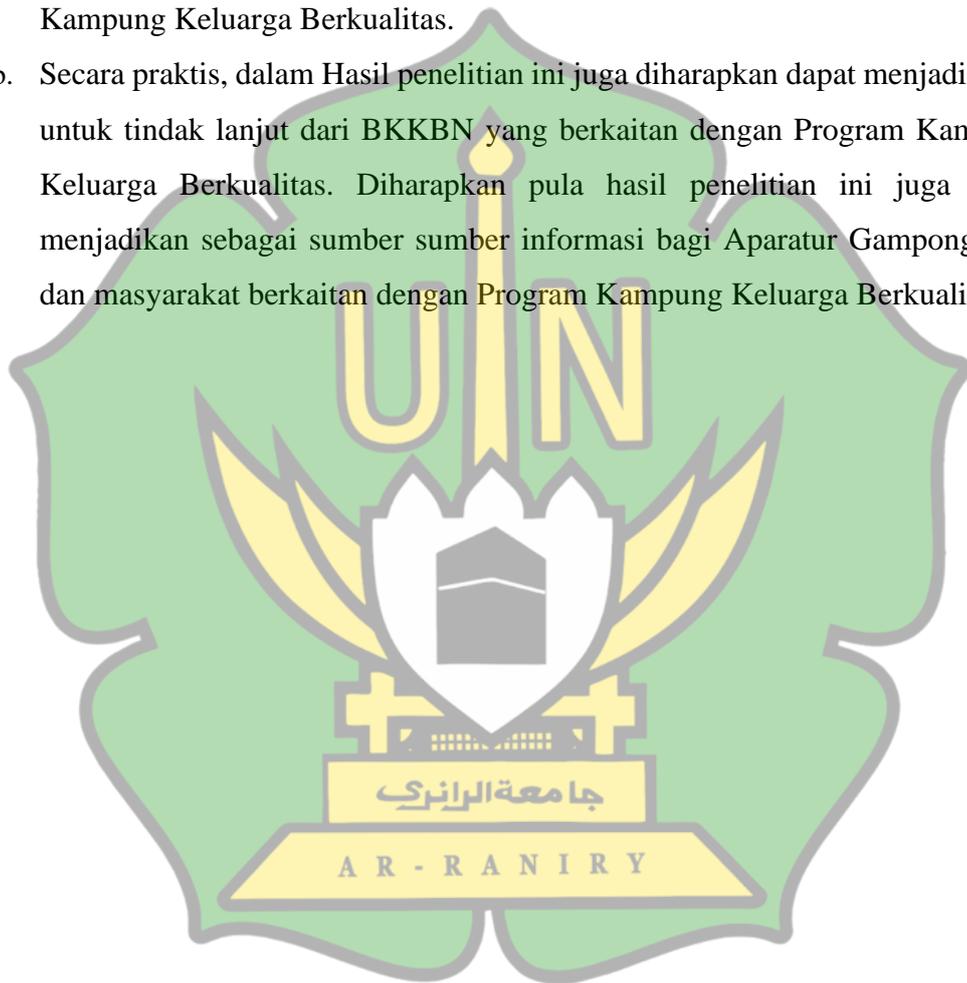
---

<sup>8)</sup> Alfathir, Khairulyadi, and Mirza, “Kampung Kb Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penduduk (Studi Di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh).”

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat terhadap efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

### **1.5 Manfaat penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan untuk menambahkan wawasan bagi peneliti, serta menjadi sebuah bahan referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan Program Kampung Keluarga Berkualitas.
- b. Secara praktis, dalam Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk tindak lanjut dari BKKBN yang berkaitan dengan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Diharapkan pula hasil penelitian ini juga dapat menjadikan sebagai sumber informasi bagi Aparatur Gampong Doy dan masyarakat berkaitan dengan Program Kampung Keluarga Berkualitas.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Erwin Apriani, Nina Damayati, Muhamad Idris tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Program Kampung KB di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program kampung KB dan faktor penghambat program kampung KB di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dengan melihat kegiatan secara langsung dari program kampung. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini observasi, dokumentasi, dan kuisioner/angket. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin terdapat program kampung keluarga berencana yang terdiri dari berbagai kegiatan yaitu: Pembinaan Keluarga Lanjut Usia (BKL), Pembinaan Keluarga Remaja (BKR), Pembinaan Keluarga Balita (BKB), dan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga. Sejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera melalui program kependudukan. Dari berbagai kegiatan dalam program kampung KB ada yang sudah berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat seperti BKL dan BKB, serta UPPKS, sedangkan kegiatan BKR masih belum berjalan dengan baik. Faktor yang menghambat kemajuan kegiatan program kampung KB adalah kurangnya sarana prasarana dan anjuran kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut.<sup>9</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwin Apriani, Nina Damayati, Muhamad Idris adalah lokasi penelitian, sedangkan

---

<sup>9</sup> Nina Damayati dan Muhamad Idris Erwin Apriani, “Efektivitas Program Kampung Kb di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin” 6, no. 1 (2021): 38–45.

persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan juga menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

2. Jurnal Tesalonika Syela Maleke, Masje Pangkey, Deysi Tampongongoy tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi atau turun langsung ke lapangan, wawancara dengan informan penelitian, dan dokumentasi tentang penelitian yang ada. Teori yang digunakan yaitu teori dari Richard M. Steers mengenai ukuran efektivitas dan indikator - indikator yang mempengaruhi efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan efektif. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dari beberapa masyarakat masih kurang sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman terhadap Program Kampung Keluarga Berencana, proses sosialisasi yang belum matang dalam persiapan dan pelaksanaannya. , dan masih belum ada fasilitas. dan infrastruktur yang harus ditambah. Saran dari peneliti agar lebih memperhatikan proses sosialisasi yang ada agar lebih teliti dalam persiapan dan pelaksanaannya agar masyarakat dapat memahami dengan baik Program Kampung Keluarga Berencana.<sup>10</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tesalonika Syela Maleke, Masje Pangkey, Deysi Tampongongoy adalah lokasi penelitian, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Kampung

---

<sup>10</sup> Tesalonika Syela Maleke Masje Pangkey And Deysi Tampongongoy, “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan” VIII, No. 2 (2022): 105–14.

Keluarga Berkualitas (KB) dan juga menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

3. Jurnal I Wayan Sentanu Juliarta tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung KB dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rejasa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis program KKBPK, menilai efektivitas pelaksanaannya, dan mengetahui hambatan pelaksanaannya di Kampung KB di Desa Rejasa. Sampel penelitian yaitu Proporsional random sampling pada kepala keluarga dan purposive sampling pada petugas KB, kelompok kerja Kampung KB, dan kepala desa. Pengumpulan data menggunakan Wawancara terstruktur, observasi, dan pencatatan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data, yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KKBPK di Kampung KB Kampung Rejasa telah terlaksana dengan baik, dari delapan indikator yang belum efektif terdapat dua indikator dalam program KKBPK di Desa Rejasa, yaitu indikator pemberdayaan perempuan dan anak, dan indikator sosial ekonomi, serta faktor penghambat pelaksanaan program KKBPK di Kampung KB Desa Rejasa adalah komitmen. dan komunikasi.<sup>11</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Sentanu Juliarta adalah lokasi penelitian, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan juga menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Umumnya efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap

---

<sup>11</sup> I Wayan Sentanu Juliarta, “Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rejasa” 10, no. 3 (2022): 224–32.

organisasi, kegiatan ataupun program. Euis Trisnawati menyebutkan bahwa “Efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai”.<sup>12)</sup>

Gladys Nurchintami dalam Mahmudi, 2007<sup>13)</sup> menyebutkan bahwa:

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas adalah kesanggupan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang tepat dan mencapainya. Oleh karena itu efektivitas mengarah pada keterkaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas diartikan kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya”.

Diah Purnamawati dalam Budiani, 2007<sup>14)</sup> menyebutkan bahwa "Untuk melihat efektivitasnya dalam suatu program, Budiani menyatakan bahwa untuk melihat dalam pencapaian suatu tujuan efektif atau tidaknya dapat dilihat dari :

1. Ketepatan Sasaran Program, Yaitu seberapa baik program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program, Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam mensosialisasikan program agar informasinya dapat disampaikan kepada masyarakat luas pada umumnya dan peserta program pada khususnya.

<sup>12</sup> Euis Trisnawati, “Efektifitas Program Rehabilitasi Sosial Di Balai Pemulihan Dan Pengembangan Sosial (BP2S) Provinsi Banten,” 2016.

<sup>13</sup> M.IP Gladys Nurchintami, Dr. Dahlawi, M.Si, Mukhrijal, S.IP., “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh” 07, no. 03 (2022).

<sup>14</sup> Diah Purnamawati, Hirshi Anadza, and Suyeno, “Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto),” *Jurnal Respon Publik* 16, no. 6 (2022): 11–18.

3. Pencapaian Tujuan Program, yaitu seberapa sesuai hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian terhadap program”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa efektivitas adalah alat ukur dari tercapainya indikator-indikator yang telah ditentukan, seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, pemantauan program.

### 2.2.2 Teori Pelayanan

Biasanya, penyedia layanan menawarkan bantuan kepada pengguna layanan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dan oleh karena itu memerlukan dukungan dari pihak yang menyediakan layanan, Aditya Putra Widayat dalam Ratminto dan Atik, 2005<sup>15</sup> menyebutkan bahwa:

“Pelayanan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk menjalankan kehidupan. Sedangkan pelayanan publik adalah kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang publik, pelayanan administrasi, dan pelayanan publik lainnya, yang diselenggarakan oleh badan-badan seperti lembaga administrasi negara, koperasi, dan organisasi independen yang didirikan berdasarkan undang-undang untuk tujuan tersebut. pelayanan publik, serta lembaga-lembaga lain yang berbentuk hukum yang fokus secara eksklusif pada pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik memegang peranan penting dalam penyediaan barang dan jasa publik”.

Tania Soraya dalam Lewis dan Gilman, 2005<sup>16</sup> menyebutkan bahwa:

“Secara terminologi, pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik yang berbentuk barang publik dan pelayanan publik

<sup>15</sup> Aditya Putra Widayat, Moh. Aris Munandar, and Slamet Sumarto, “Kinerja Birokrasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Dengan Aplikasi Quick Response Dan WEB Di Kantor Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang,” *Unnes Political Science Journal* 1, no. 2 (2017): 99–106.

<sup>16</sup> Tania Soraya and Puji Astuti, “Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online Di Kabupaten Pati,” *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 4 (2019): 61–70.

yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah pusat atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Lewis dan Gilman, pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nilai akuntabilitas atas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan. Akuntabilitas terhadap aspek-aspek yang dilayani merupakan bagian dari pemenuhan pelayanan publik untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, karena kepercayaan masyarakat merupakan landasan bagi tercapainya pemerintahan yang baik. Secara regulasi, penyelenggaraan pelayanan publik didukung oleh undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kebijakan ini mengharuskan pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa serta pelayanan administrasi”.

Tania Soraya, 2019<sup>17</sup> juga menyebutkan bahwa “pelayanan publik dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kelompok Pelayanan Administrasi

Kelompok pelayanan administrasi merupakan suatu pelayanan yang menghasilkan berbagai macam bentuk dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat (publik). Misalnya Kartu Keluarga (KK), akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, status kewarganegaraan.

2. Kelompok Pelayanan Barang

Kelompok pelayanan jasa barang merupakan suatu jasa yang menghasilkan berbagai bentuk barang digunakan oleh masyarakat. Misalnya jaringan telepon, penyediaan listrik dan air bersih.

3. Kelompok Pelayanan Jasa

Kelompok pelayanan jasa adalah suatu jasa yang menghasilkan berbagai bentuk jasa dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya angkutan umum.

Pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi pelayanan publiknya. Oleh karena itu, pemerintah

---

<sup>17</sup> Ibid.

harus mampu melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan publik sebagai ukuran dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dipatuhi baik oleh pemberi layanan maupun penerima layanan”.

Ria Yuli Angliawati dalam Kotler, 1997<sup>18)</sup> menyebutkan bahwa:

“Pelayanan merupakan suatu penampilan kerja, tidak berwujud dan cepat hilang, dapat dirasakan daripada dimiliki dan pelanggan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses mengkonsumsi jasa atau jasa. Dengan demikian hakikat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan wujud kewajiban pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan, Gronroos mengartikan pelayanan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan, interaksi dengan seseorang atau mesin secara fisik dan pemberian kepuasan pelanggan. Konsep mutu menjadi ukuran keberhasilan organisasi tidak hanya pada organisasi bisnis saja, namun juga pada organisasi atau lembaga pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Sejumlah ahli menjelaskan konsep ini dengan istilah yang saling menguatkan sesuai dengan perspektif yang digunakan untuk menentukan karakteristik layanan tertentu. Hakikat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat”.

### 2.2.3 Konsep Pembinaan

Dessi andriani dalam werther dan Davis 1996<sup>19)</sup> menyebutkan bahwa:

“Pengertian pembinaan menurut Werther dan Davis adalah upaya membantu individu menangani tanggung jawab masa depan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas, pembinaan individu mencurahkan perhatiannya kepada individu sebagai pribadi, dalam kaitannya dengan pekerjaan dan organisasi, dan memberikan perhatian terutama pada hubungan individu. Kemudian menurut Gilley dan Egglund juga disebutkan bahwa pembinaan adalah upaya mengarahkan individu agar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan, meningkatkan ketrampilan, kompetensi, dan memperbaiki perilaku individu dalam organisasi. baik secara pribadi maupun secara profesi”.

<sup>18</sup> Ria Yuli Angliawati, “Peran Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Theoretical Review,” *Ecodemica* IV, no. 2 (2016): 203–13.

<sup>19</sup> Dessi Andriani, “Pengaruh Pembinaan, Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Paud Kec. Talang Kelapa,” *PERNIK: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2019): 38–52.

Siti Nisrima menyebutkan dalam Mathis, 2002<sup>20)</sup> bahwa:

“Mathis mengatakan pembinaan adalah suatu proses dimana orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena proses ini berkaitan dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich mengartikan pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya saat ini atau dalam pekerjaan lain yang akan segera dijabatnya. Pembinaan merupakan suatu proses pembelajaran yang dialami seorang anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota suatu kelompok masyarakat. Syarat penting agar proses pembinaan dapat berlangsung adalah interaksi sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial maka proses pembinaan tidak mungkin dapat berlangsung. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang bersifat dinamis yang melibatkan hubungan antar individu, antar kelompok manusia, dan antara individu dengan kelompok manusia”.

#### 2.2.4 Konsep Kampung KB

Kapanewon Ngemplak dalam Anderson, 2022<sup>21)</sup> menyebutkan bahwa:

“Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas adalah salah satu inovasi program dari KKBPK (Keluarga Berencana Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) yang bekerjasama dengan lembaga atau kementerian, mitra kerja atau pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Dalam rangka meningkatkan akseptor KB dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa, maka Kampung Keluarga Berkualitas hadir untuk mewujudkan hal tersebut yang meliputi kegiatan peningkatan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), Pembinaan Keluarga Remaja (BKR), PIK-R (Pusat Informasi dan Penyuluhan Remaja), dan UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Kelima kelompok kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan 8 fungsi keluarga. Kebijakan adalah tindakan yang disetujui oleh pemerintah, dikeluarkan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat umum”.

---

<sup>20</sup> Siti Nisrima, Muhammad Yunus, and Erna Hayati, “Pembinaan Perilaku Sosial Remaja Penghuni Yayasan Islam Media Kasih Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1 (2016): 192–204.

<sup>21</sup> Kapanewon Ngemplak et al., “*Journal of Social and Policy Issues Analisis Implementasi Kampung KB ( Keluarga Berkualitas ) Di Kalurahan Bimomartani*,” 1 (2024): 0–4.

Sutarni, 2020<sup>22)</sup> menyebutkan bahwa:

“Kampung KB menjadi salahsatu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salahsatu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/lembaga, mitra kerja, Stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) diseluruh Kabupaten dan kota”.

Alex Sihol Batubara dalam Sururi 2023<sup>23)</sup> menyebutkan bahwa:

“Rebranding Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Dengan rebranding ini diharapkan akan terwujud integritas dan konvergensi dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan keluarga dalam segala dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) awalnya mengambil ungkapan Kampung Keluarga Berencana yang mempunyai arti satuan luas setingkat RW, Dusun, atau sederajat dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antar program Bangga Kencana, serta sebagai pengembangan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. keluarga dan masyarakat. Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) menekankan penguatan kelembagaan keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus hidup. Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) diprioritaskan pada wilayah pinggiran, miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, DAS dan wilayah nelayan diseluruh tanah air. Dalam kerangka pembangunan nasional, Desa Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dikembangkan sebagai strategi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Indonesia dari pinggiran. Dengan adanya Desa Keluarga Berkualitas diharapkan menjadi fasilitas bersama antara pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan keluarga dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. /kecamatan. Kampung KB juga menjadi salah satu

---

<sup>22</sup> Sutarni, “Efektivitas Program Kampung Kb (Keluarga Berencana) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Dusun Borong Ampirie Desa Kalobbake Camatan Tellulimpoe,” 2020.

<sup>23</sup> Alex Sihol Batubara, Ali Yusri, And Abdul Sadad, “Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru,” *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik* 9, No. 1 (2024): 53–61.

inovasi strategis untuk dapat melaksanakan kegiatan prioritas Program KKBPk secara utuh di lapangan”.

Dina Anike Lumendek dalam Mardiono, 2017<sup>24</sup>) menyebutkan bahwa:

“Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang dibentuk sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa serta pembangunan sektor dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas yang merupakan salah satu inovasi strategis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk), saat ini juga dikenal dengan nama Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Keberadaan kampung KB di setiap daerah tidak hanya berbicara tentang alat kontrasepsi saja, namun terdapat beberapa manfaat lainnya yaitu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan program di bidang pembangunan”.

Triyanan Pipit Mulyah, 2020<sup>25</sup> menyebutkan bahwa:

“Konsep Kampung KB adalah miniatur pelaksanaan program Keluarga Berencana secara terpadu dan komprehensif di tingkat lini lapangan (desa/kelurahan/dusun/RW). Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggungjawab masyarakat, yakni melalui upaya menjadikan Kampung KB sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Partisipasi berbagai instansi dalam Kampung KB sangat penting sehingga pelayanan prima dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Perlu dilakukan langkah koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB”.

---

<sup>24</sup> Dina Anike Lumendek et al., “Pendampingan Masyarakat Dalam Meningkatkan UMKM Dan Pemenahan Sarana Adminisratif Rumah Dataku Di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) ‘Melati’ Kelurahan Blotongan Kota Salatiga,” *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 460–73.

<sup>25</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Probolinggo,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 513–22.

### 2.2.5 Konsep Kesejahteraan

Onny Medaline, 2017<sup>26)</sup> menyebutkan bahwa:

“Secara harfiah, kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup. Kata kesejahteraan mengandung arti kemakmuran, yaitu suatu konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Menurut Walter A. Friedlander, kesejahteraan sosial adalah suatu sistem pelayanan dan lembaga sosial terorganisir yang bertujuan membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat”.

Onny Medaline, 2017<sup>27)</sup> juga menyebutkan bahwa:

“Secara normatif, persoalan kesejahteraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ditegaskan bahwa: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Rumusan ini merupakan gambaran ideal suatu tatanan (tatanan kehidupan) yang mencakup kehidupan material dan spiritual, tanpa menempatkan aspek yang satu lebih penting dari aspek lainnya, namun lebih berusaha melihat upaya untuk mencapai titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, atau keseimbangan antara aspek materi dan spiritual. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya intervensi pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan”.

Astria Widyastuti dalam Segel dan Bruzy, 1998<sup>28)</sup> menyebutkan bahwa:

“Kesejahteraan merupakan tolak ukur suatu masyarakat berada dalam keadaan sejahtera. Kesejahteraan ini dapat diukur dari kesehatan, kondisi ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup

<sup>26</sup> Onny Medaline, “Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah,” *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 142–53.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Astria Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 1–11.

masyarakat. Kesejahteraan tersebut diwujudkan agar warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat mengalami kesejahteraan. Keluarga sejahtera dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan di suatu daerah, yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah tersebut. Pengertian sejahtera adalah suatu keadaan manusia dimana masyarakatnya berada dalam keadaan sejahtera, sehat dan tenteram, sehingga untuk mencapai keadaan tersebut orang tersebut memerlukan usaha sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat miskin atau kurang sejahtera dalam program Pembangunan Keluarga Sejahtera BKKBN dibagi menjadi dua, yaitu keluarga sejahtera dan keluarga pra sejahtera. Pemahaman konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolutnya (kesejahteraan ekonomi). Beragamnya konsep kesejahteraan dalam masyarakat dapat diartikan bahwa kesejahteraan mempunyai pengertian yang relatif. Konsep kesejahteraan tidak lepas dari kualitas hidup masyarakat, dimana kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dan perekonomian masyarakat. Disimpulkan bahwa pengertian ukuran kesejahteraan pada awalnya hanya diukur melalui aspek fisik dan pendapatan, namun dalam perkembangan saat ini, kesejahteraan diukur melalui beberapa indikator seperti kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi”.

#### 2.2.6 Indikator Efektivitas

Diah Purnamawati dalam Budiani, 2007<sup>29)</sup> menyebutkan bahwa “untuk melihat efektivitas nya dalam suatu program, Budiani menyatakan bahwa untuk melihat dalam pencapaian suata tujuan efektif atau tidak nya dapat dilihat dari:

1. Ketepatan Sasaran Program, Yaitu seberapa baik program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program, Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam mensosialisasikan program agar informasi pelaksanaannya dapat disampaikan kepada masyarakat luas pada umumnya dan peserta program pada khususnya.
3. Pencapaian Tujuan Program, yaitu seberapa sesuai hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>29</sup> Purnamawati, Anadza, and Suyeno, “Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto).”

4. Pemantauan program, Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian terhadap program”.

### **2.2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja masyarakat,

Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dijelaskan bahwa penyusunan rencana kerja masyarakat dilakukan dengan cara pemetaan masalah atau potensi, penentuan prioritas masalah dan penetapan rencana kerja masyarakat.

2. Pelaksanaan rencana kerja masyarakat

Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rencana kerja masyarakat dilakukan dengan cara rapat koordinasi, sosialisasi kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dijelaskan bahwa pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

4. Pelaporan

Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dijelaskan bahwa pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas secara periodik oleh penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas..



## Kerangka Berpikir

**EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) DI  
GAMPONG DOY, KECAMATAN ULEE KARENG, KOTA BANDA ACEH**



Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas



Rumusan masalah

1. Bagaimana efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh?



### **FOKUS PENELITIAN**

#### **A. Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB)**

1. Efektivitas
  - a. Ketepatan Sasaran Program
  - b. Pencapaian Tujuan Program
2. Pembinaan
  - c. Sosialisasi Program
  - d. Pemantauan Program

#### **B. Faktor yang Mempengaruhi Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB)**

1. Program KB
  - a. Penyusunan
  - b. Pelaksanaan
2. Pelayanan
  - c. Pemantauan dan evaluasi
  - d. Pelaporan

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian pada kajian “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh” menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif deskriptif, seperti melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Hal ini dimaksudkan dengan menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif, kita dapat mengkaji, mengungkap, dan menjelaskan secara lebih mendalam hasil wawancara narasumber yang disajikan dalam format deskriptif.

### 3.2 Fokus & Indikator Penelitian

Adapun fokus dan indikator penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2.

**Tabel 3. 1**

Dimensi dan Indikator Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB)

Dimensi	Indikator
Efektivitas	a. Ketepatan sasaran program b. Pencapaian tujuan program
Pembinaan	a. Sosialisasi program b. Pemantauan program

Sumber : Budiani (2007:53)

**Tabel 3. 2**

Dimensi dan Indikator Faktor yang mempengaruhi Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB)

Dimensi	Indikator
Program KB	a. Penyusunan b. Pelaksanaan
Pelayanan	a. Pemantauan dan evaluasi b. Pelaporan

Sumber : BKKBN No 20 Tahun 2023

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Waktu Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah perkataan dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Perkataan dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer), sedangkan data lainnya dapat berupa sumber tertulis (sekunder).

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung melalui wawancara informan atau responden dan observasi. Informan akan diwawancarai oleh peneliti guna mengumpulkan data tentang pengelolaan sampah.

#### 2. Data Sekunder

Informasi tambahan yang mendukung data primer disebut data sekunder. Informasi tambahan kajian dari berbagai sumber, antara lain jurnal, skripsi, dan lain sebagainya.

### 3.5 Informan Penelitian

Adapun informan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

A R Data Informan Y

No.	Informan	Jumlah
1.	Kasi Kesejahteraan Gampong Doy	1 Orang
2.	Kelompok kerja (Pokja) Kampung KB di Gampong Doy	1 Orang
2.	Kader Kampung KB di Gampong Doy	1 Orang
3.	Masyarakat Gampong Doy	2 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>5 Orang</b>

Sumber : Data diolah 2024

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun menggunakan teknik pengumpulan data oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Adanya suatu komunikasi yaitu untuk menanyakan informasi sehingga dapat mengetahui informasi tentang strategi penyediaan kebutuhan bagi korban yang terdampak bencana kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

2. Dokumentasi

Cara untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan foto, mencatat, dan lain nya yang terkait dengan dokumentasi.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, cara dengan mengamati serta mencatat gejala-gejala objek penelitian secara sistematis sehingga terarah. Adapun tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, (ruang), pelaku, benda, kegiatan, tindakan atau peristiwa.

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*.

1. *Credibility*

Kredibilitas dalam penelitian kuantitatif disebut dengan validitas internal. Jika ada kesamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dan apa yang sebenarnya terjadi pada topik penelitian, maka temuan dalam penelitian kualitatif mungkin dianggap kredibel.

2. *Transferability*

Pada penelitian kualitatif, adapun nilai transferabilitas bergantung pada pembacanya, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam konteks dan situasi sosial lainnya.

3. *Dependability*

Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan

dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

#### 4. *Confirmability*

Confirmability dalam Penelitian Ilmiah lebih tepatnya, istilah kualitatif mengacu pada gagasan transparansi yaitu, kemampuan peneliti internal untuk mempublikasikan prosedur dan komponen internal penelitian mereka.<sup>30</sup>

### 3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Proses seleksi yang dikenal sebagai reduksi data berfokus pada kesederhanaan, abstraksi, dan modifikasi data kasar yang dikumpulkan melalui catatan lapangan.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian kumpulan informasi sehingga memungkinkan adanya potensi untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang tepat.

#### 3. Kesimpulan atau verifikasi

Peneliti selalu berupaya membuat kesimpulan ketika berada di lapangan. Selama masa penelitian, kesimpulan-kesimpulan ini juga di verifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) mempertimbangkan kembali saat menulis; (2) meninjau catatan lapangan; (3) mengkaji dan mendiskusikan temuan dengan rekan kerja untuk membangun kesepakatan intersubjektif; dan (4) melakukan upaya signifikan untuk memasukkan duplikat temuan ke dalam kumpulan data lain.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

<sup>31</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81,

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Gampong Doy**

Secara administrasi Gampong Doy merupakan salah satu gampong dari sembilan Gampong yang terletak di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Secara geografis, Gampong Doy mempunyai posisi strategis di Kota Banda Aceh dikarenakan memiliki akses yang cukup luas sehingga dapat dicapai dari berbagai tempat di Kota Banda Aceh.

Dengan kondisi tersebut maka Gampong Doy mudah dijangkau oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan di Gampong Doy. Gampong Doy merupakan salah satu Gampong yang heterogen karena penduduk yang berada di Gampong Doy terdiri dari berbagai etnis yang ada di Aceh, bahkan sebagiannya merupakan etnis luar Aceh.

Gampong Doy berada pada Kemukiman Simpang Tujuh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Menurut penuturan orang-orang tua terdahulu dan fakta sejarah Gampong Doy sudah ada kira-kira tahun 1800M. Hal ini dapat kita lihat banyaknya kuburan-kuburan yang tidak diketahui oleh ahli warisnya.

Selain juga kuburan yang batu nisan bertulisan kuno dan fakta sejarah adanya dua kuburan Syech yaitu Kuburan Tgk Syiah lem di Dusun Menasah Nibong dan Kuburan Tgk Jierat Adee yang terletak di Dusun Tgk Adee. Sistem pemerintahan Gampong Doy baru ada setelah tahun 1945 M, dengan Keuchik pertama adalah Teuku Raden.

##### **4.1.2 Sejarah Pembangunan Gampong**

Sejarah Pembangunan Gampong Doy dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
Sejarah Pembangunan Gampong

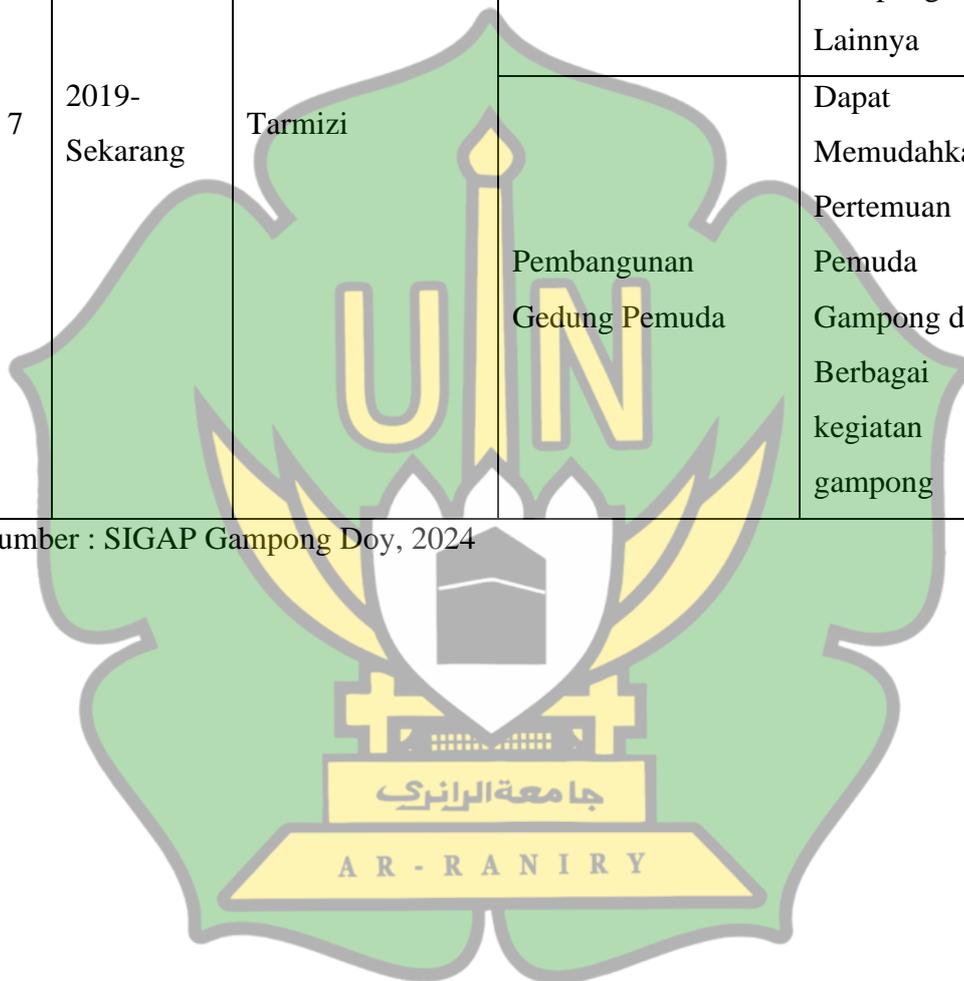
No	Tahun	Keuchik	Peristiwa	Dampak
1	1963-1977	Hasyim Rayeuk	Renovasi Meunasah Gampong Doy	Kenyamanan beribadah bagi masyarakat
			Pekerasan Jalan Gampong	Kelancaran arus transportasi ke luar gampong
2	1977-1988	M Husin Gam	Pembangunan sarana pendidikan sekolah dasar	Kelancaran pendidikan dasar bagi anak wajib sekolah
3	1989-2004	H M Daud HS	Pembukaan jalan baru	Kelancaran transportasi ke luar Gampong.
			Pembangunan Masjid Sabilil Jannah	Kenyamanan beribadah bagi masyarakat.
			Pembangunan TK dan PAUD	Kelancaran anak usia dini dalam bermain dan belajar.
			Pembangunan Kantor Keuchik	Pelayanan Administrasi masyarakat.
			Pembangunan Kantor Mukim	
Pembangunan Gedung PKK	Adanya tempat berkumpul kaum perempuan.			

			Pembangunan saluran drainase	Dapat mencegah tergenang air.
			Rehap Meunasah Gampong Doy	Kenyamanan beribadah bagi masyarakat.
			Pembangunan Gedung BUMG Doy	Dapat meningkatkan Pendapatan asli Gampong.
4	2006-2011	Amir Yahya	Lanjutan Pembangunan saluran Drainase	Dapat mencegah tergenang air pada saat musim hujan
			Pengaspalan jalan Gampong	Kelancaran transportasi keluar gampong
			Pembangunan rumah Duafa	Meringankan beban hidup bagi masyarakat miskin dan duafa
			Pembangunan jalan rabat beton lingkungan	Kelancaran Masyarakat dalam transportasi
			Lanjutan Pembangunan Gedung BUMG Doy	Dapat meningkatkan pendapatan asli Gampong

5	2011-2012	Tarmizi	Renovasi tempat Wudhu Meunasah	Kenyamanan beribadah bagi masyarakat
6	2013-2018	Ir. Syamsuddin	Lanjutan pembangunan saluran drainase	Dapat mencegah tergenang air dilingkungan masyarakat.
			Lanjutan pengaspalan jalan Gampong Doy	Melancarkan arus transportasi di dalam maupun luar Gampong
			Lanjutan pembangunan rabat beton lingkungan	
			Pembangunan Rumah Duafa	Meringankan beban hidup bagi masyarakat miskin dan duafa
			Renovasi rumah warga miskin	
Pemasangan lantai keramik dan Perluasan Gedung PKK	Kenyamanan bagi berkumpul kader PKK dan kegiatan Posyandu			
Pembangunan tempat pengolahan sampah dan plastik	Dapat menjaga kebersihan lingkungan dan dapat meningkatkan asli Gampong			

			Pembangunan sumur bor masjid Sabilil Janah Gampong Doy	Kenyamanan beribadah bagi masyarakat
7	2019- Sekarang	Tarmizi	Rehap Gedung PKK	Kenyamanan untuk Kefiatan PKK Posyandu dan Kegiatan Gampong Lainnya
			Pembangunan Gedung Pemuda	Dapat Memudahkan Pertemuan Pemuda Gampong dalam Berbagai kegiatan gampong

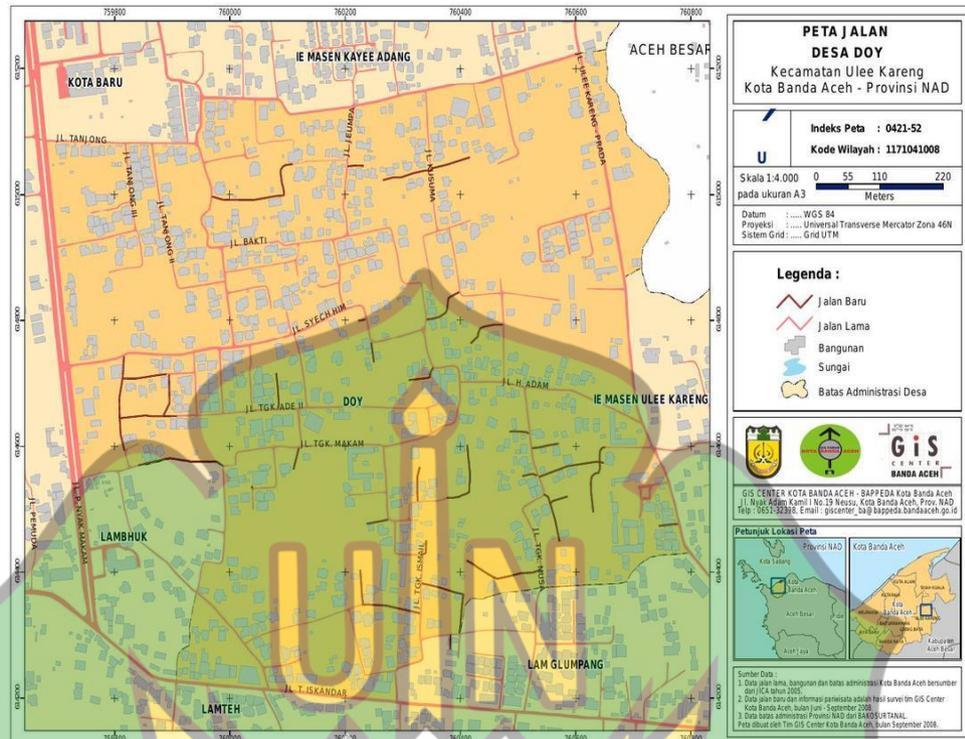
Sumber : SIGAP Gampong Doy, 2024



### 4.1.3 Geografis Gampong Doy

**Gambar 4.1**

Peta Gampong Doy



Sumber: UPTB-GIS Banda Aceh 2024

Luas wilayah Gampong Doy 62.50 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ie Masen Kayee Adang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamteuh
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Ie Masen Ulee Kareng
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lambhuk

Gampong Doy terletak di tengah-tengah perkotaan, sebagian penduduknya bekerja di sektor kewirausahaan, jasa, dan pemerintahan, terdiri dari:

1. 50 % Buruh Kasar (Tukang Bangunan)
2. 25 % pemerintahan
3. 25 % wirausaha

Jumlah Dusun yang ada di Gampong Doy terdiri dari 4 (empat) Dusun dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4. 2**

Dusun di Gampong Doy dan Luasnya

No	Dusun	Luas wilayah	
1	Dusun Nibong	20 ha	200,000m <sup>2</sup>
2	Dusun Deyah Alue	17 ha	170,000m <sup>2</sup>
3	Dusun Tgk Adee	17 ha	170,000m <sup>2</sup>
4	Dusun Kapai Kleng	14 ha	140,000m <sup>2</sup>
<b>Total</b>		68 ha	680,000m <sup>2</sup>

Sumber : SIGAP Gampong Doy, 2024

**4.1.4 Visi Dan Misi Gampong Doy**

Visi merupakan gambaran atau kondisi yang ingin dicapai dalam masa mendatang baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Adapun Visi dari Gampong Doy adalah Tercapainya Tata Kelola Pemerintah Gampong yang baik dan bersih guna mewujudkan Gampong Doy yang Gemilang dalam bingkai syariah.

Misi merupakan tugas untuk mewujudkan visi yang telah disepakati bersama. Adapun Misi Gampong Doy antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, efektif, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan usaha sebagai berikut:
  - a. Peningkatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Gampong dan Tuha Peut Gampong.
  - b. Memberikan Pelatihan peningkatan Kapasitas bagi keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong.
  - c. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Perekonomian
  - a. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha penambahan pendapatan keluarga.
  - b. Menciptakan lapangan kerja dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong.
  - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong dengan unit-unit usahanya.
  - d. Memfasilitasi pemuda di kegiatan perekonomian

3. Agama, Adat Istiadat dan Olah Raga
  - a. Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan pendidikan agama bagi anak-anak melalui taman pendidikan anak usia dini.
  - b. Menghidupkan Kegiatan adat istiadat yang ada dalam masyarakat
  - c. Menggali kembali adat istiadat yang ada di Gampong Doy.
  - d. Menggerakkan kegiatan kepemudaan dalam bidang Olah raga dan Keagamaan.
4. Hukum
  - a. Menyusun Reusam Gampong sebagai payung hukum bagi masyarakat Gampong dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.
  - b. Menyusun Reusam Gampong sebagai payung hukum dalam pengelolaan Pendapatan Asli Gampong dan Aset gampong.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Alam :
  - a. Memberikan Pendidikan dan Keterampilan bagi Ibu-ibu dan pemuda serta masyarakat gampong pada umumnya.
  - b. Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan pendidikan agama bagi anak-anak melalui taman pendidikan anak usia dini.
  - c. Memanfaatkan Sumber alam yang tersedia sebagai mata pencarian masyarakat.

#### **4.1.5 Sejarah Pemerintahan Gampong**

Pada tanggal 25 Agustus dilakukan pemilihan kepala Gampong untuk memilih Keuchik Gampong definitif yang dilaksanakan oleh Tuha Peut Gampong sebagai Panitia Pilkades dan masyarakat Gampong sebagai peserta pemilihan tersebut.

Adapun dalam pemilihan dimaksud yang menjadi pemenang adalah Tarmizi. Kemudian diangkat menjadi Keuchik Gampong Doy Definitif, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh No. 605 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 untuk masa bakti 2019 s/d 2025.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim Perencanaan Gampong, dengan mengacu kepada nara sumber yang masih ada di

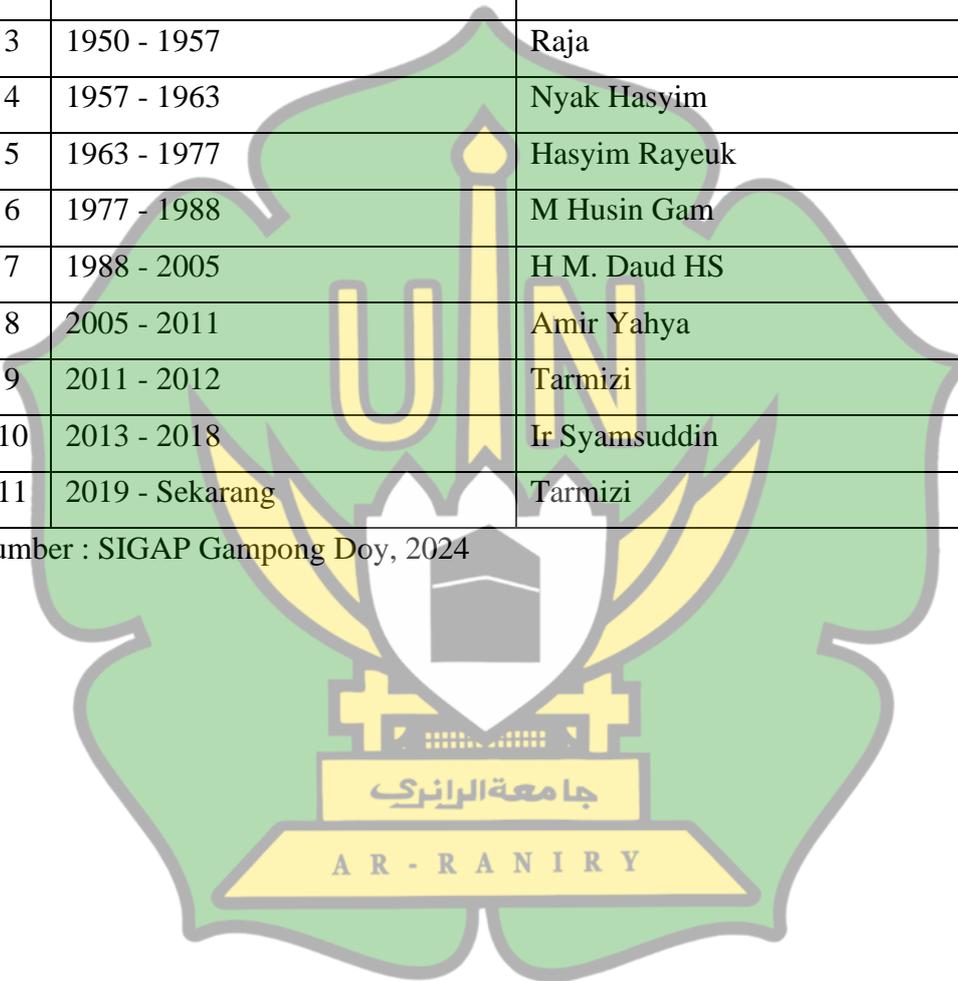
Gampong, maka sejarah Kepemerintahan Gampong Doy yang di Dapati ditelusuri sebagai mana yang ada dalam tabel berikut :

**Tabel 4.3**

Sejarah Kepemerintahan Gampong Doy

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KEUCHIK</b>
1	1945 - 1946	Teuku Raden
2	1946 - 1950	Teuku Usman
3	1950 - 1957	Raja
4	1957 - 1963	Nyak Hasyim
5	1963 - 1977	Hasyim Rayeuk
6	1977 - 1988	M Husin Gam
7	1988 - 2005	H M. Daud HS
8	2005 - 2011	Amir Yahya
9	2011 - 2012	Tarmizi
10	2013 - 2018	Ir Syamsuddin
11	2019 - Sekarang	Tarmizi

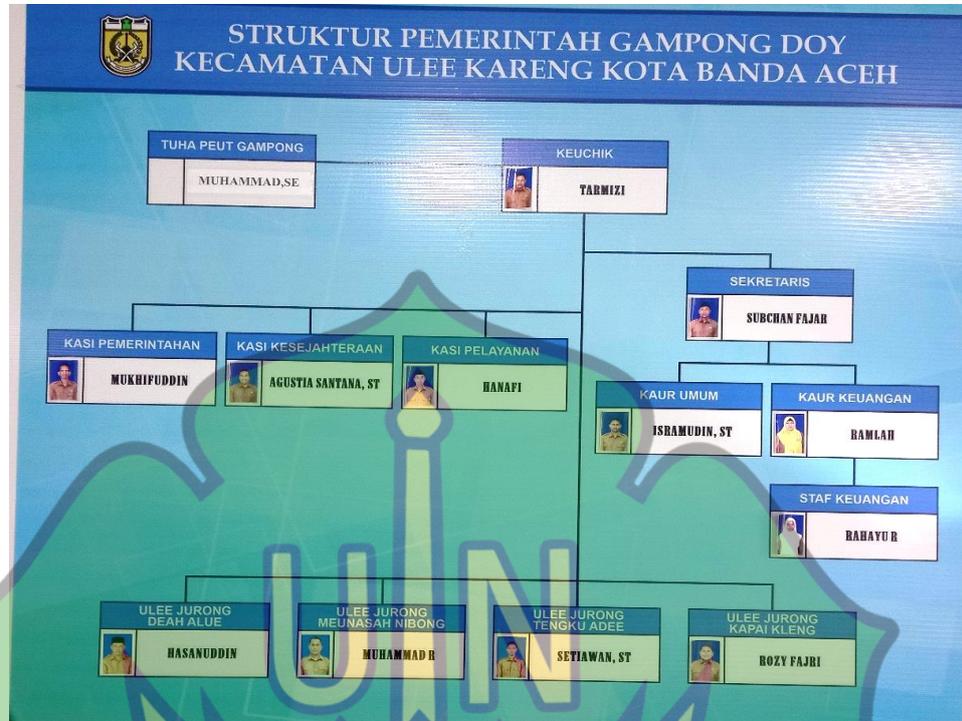
Sumber : SIGAP Gampong Doy, 2024



#### 4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Doy

Gambar 4.2

Struktur Pemerintah Gampong Doy



Sumber : Kantor Keuchik Gampong Doy, 2024

Adapun tugas dari masing-masing bidang di kantor keuchik sebagai berikut:

1. Tarmizi, selaku Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Subchan Fajar selaku Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
3. Isramudin, ST selaku Kepala Urusan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
4. Ramlah selaku Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu sekretaris desa dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan APBDesa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Rahaya R sebagai staf keuangan yang membantu Ramlah.

5. Mukhifuddin selaku Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
6. Agustia Santana, ST selaku Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
7. Hanafi selaku Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
8. Hasanuddin, Muhammad H, Setiawan, ST, dan Rozy Fajri selaku Kepala Dusun berkedudukan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh**

Adapun dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa-desa, Kampung Keluarga Berkualitas (KB) hadir dalam mewujudkannya, yang mana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), serta UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

Dalam penelitian efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dapat dilihat dengan menggunakan 4 indikator yaitu Ketepatan

Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program dan Pemantauan Program.

Berdasarkan observasi peneliti lapangan menunjukkan bahwa Kamis, 29 Agustus 2024 kader posyandu lansia dan Petugas kesehatan dari Puskesmas Ulee Kareng yang sedang melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia di Mesjid Sabilil Jannah.

Kegiatan posyandu kali ini meliputi: penyuluhan kesehatan, senam lansia dan screening lansia (pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan gula darah) yang dihadiri oleh lebih dari 50 lansia dari 4 dusun yang ada di Gampong Doy.

**Gambar 4.3**

Posyandu dan Bina Keluarga Lansia (BKL)



Sumber : Gampong Doy, 2024

Berdasarkan observasi peneliti lapangan selanjutnya menunjukkan bahwa Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, berlangsung setiap bulan sekali sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selasa (02/12/2024) Kegiatan Posyandu merupakan sebuah momen penting partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan balita.

Melalui kegiatan posyandu dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak diantaranya mengatasi adanya kekurangan gizi balita yang menyebabkan meningkatnya risiko stunting, terganggunya pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan kecerdasan anak.

Setelah Balita mengikuti posyandu akan diarahkan ke area bermain balita yang didampingi oleh Kader BKB bermain sesuai dengan kelompok umurnya sehingga balita mengembangkan dan mengoptimalkan aspek tertentu kemampuan fisik, bahasa, kognitif, serta adaptasi sosialnya secara optimal dalam memainkan Alat Permainan Edukatif (APE) yang telah disediakan oleh Kader BKB.

**Gambar 4.4**

Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB)



Sumber : Gampong Doy, 2024

### 1. Ketepatan Sasaran Program

Asmamaw Alemayehu Shelemo menyebutkan bahwa:

“Ketepatan sasaran program dalam teori Budiani menyatakan bahwa sejauh mana ketepatan suatu program yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka

pendek, dan lebih bersifat operasional, penentu yang tepat dan baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan secara kelompok sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan program”.<sup>32)</sup>

**Gambar 4.5**

**Rencana Kerja Masyarakat (RKM)**

NO	URAIAN KEGIATAN	JANUARI	FEBRUARI	MAREK	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	KECANTIKAN
1	Pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Terintegrasi Dengan Posyandu													Kader Bina
2	Pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Terintegrasi Dengan Posyandu													Kader BKL
3	Festival Anak Sholeh II (PK R/M)													Remaja Masjid Sabili Jannah
4	Kegiatan Kelompok Kerja Di Kampung KB													DPK/P2TG
5	Kegiatan Operasional Kesehatan Keluarga Berbasis Poltek													DPK/P2TG
6	Kegiatan Penyuluhan Pola Asuh Anak Remaja													PEMERINTAH DESA DOY
7	Kegiatan Rembuk Stunting													PEMERINTAH DESA DOY
8	Kegiatan Peatihan Farfhu (Farah)													PEMERINTAH DESA DOY
9	Pembinaan/Pemeliharaan Drainase Gempong													PEMERINTAH DESA DOY
10	Penyngkapan Badan Iatan Gempong													PEMERINTAH DESA DOY
11	Penanganan Covid - 19													PEMERINTAH DESA DOY
12	Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)													PEMERINTAH DESA DOY
13	Pelehan Seni Tari Bagi Anak-Anak Gempong Doy													PKK Desa Doy (Pola II)

Sumber : BKKBN Gempong Doy, 2024

Analisis dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang terdapat dalam gambar 4.5 yaitu:

1. Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Terintegrasi Dengan Posyandu

<sup>32</sup> Asmamaw Alemayehu Shelemo, "Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online Di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan," Nucl. Phys. 13, No. 1 (2023): 104–16.

Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Terintegrasi dengan Posyandu dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini di pandu oleh Kader BKB.

2. Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Terintegrasi Dengan Posyandu

Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Terintegrasi dengan Posyandu dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini di pandu oleh Kader BKL.

3. Festival Anak Sholeh II (PIK R/M)

Kegiatan Festival Anak Sholeh II (PIK R/M) dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan April yang di pandu oleh Remaja Mesjid Sabilil Jannah.

4. Kegiatan Kelompok Kerja Di Kampung KB

Kegiatan Kelompok Kerja Di Kampung KB dilaksanakan setiap satu tahun enam kali, yaitu pada bulan Februari, Mei, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kegiatan ini di pandu oleh DPKAP2KB.

5. Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan

Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan dilaksanakan setiap satu tahun tujuh kali, yaitu pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kegiatan ini di pandu oleh DPKAP2KB.

6. Kegiatan Penyuluhan Pola Asuh Anak Remaja

Kegiatan Penyuluhan Pola Asuh Anak Remaja dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan Mei yang di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

7. Kegiatan Rembuk Stunting

Kegiatan Rembuk Stunting dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

8. Kegiatan Pelatihan Fardhu Kifayah

Kegiatan Pelatihan Fardhu Kifayah dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan September. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

9. Pembangunan/Pemeliharaan Drainase Gampong

Pembangunan/Pemeliharaan Drainase Gampong dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan Oktober. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

10. Peningkatan Badan Jalan Gampong

Peningkatan Badan Jalan Gampong dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan September. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

11. Penanganan Covid-19

Penanganan Covid-19 dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

12. Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

13. Pelatihan Seni Tari Bagi Anak-Anak Gampong Doy

Pelatihan Seni Tari Bagi Anak-Anak Gampong Doy dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini di pandu oleh PKK Gampong Doy (Pokja II).

Berdasarkan analisis dokumen diatas dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dilaksanakan berbagai kegiatan di Gampong Doy dilaksanakan secara terorganisasi dan rutin sepanjang tahun.

Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terintegrasi dengan Posyandu, Penanganan Covid-19, Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta Pelatihan Seni Tari dilakukan setiap bulan. Festival Anak Sholeh II (PIK R/M) dilaksanakan setahun sekali pada bulan April oleh Remaja Mesjid, sementara Kelompok Kerja Kampung KB dan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan masing-masing diadakan enam dan tujuh kali setahun.

Kegiatan tahunan lainnya, seperti Penyuluhan Pola Asuh Anak Remaja, Rembuk Stunting, Pelatihan Fardhu Kifayah, Pembangunan Drainase, dan Peningkatan Badan Jalan, dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan tertentu oleh Pemerintah Gampong dan pihak terkait lainnya.

Semua kegiatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini di pandu oleh Kader BKB, Kader BKL, Remaja Mesjid Sabilil Jannah, DPKAP2KB, Pemerintah Gampong Doy, PKK Gampong Doy (Pokja II).

Adapun sasaran dari Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kesejahteraan Gampong Doy menyebutkan bahwa

“Untuk Ketepatan sasaran sudah tepat, proses penentuan sasaran kita ada rapat dalam MusDes melibatkan para disabilitas, dan juga masyarakat yang kurang mampu, serta ibu ibu yang mempunyai keahlian keahlian khusus, jadi kita duduk dalam MusDes namanya Musyawarah Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy sudah tepat, dalam proses penentuan sasaran diadakan rapat dalam MusDes yang melibatkan para disabilitas, dan juga masyarakat yang kurang mampu, serta ibu ibu yang mempunyai keahlian keahlian khusus, dikumpulkan dalam Musyawarah Desa atau yang disebut dengan MusDes.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pokja Kampung KB yang menjelaskan juga bahwa:

“Untuk sasaran udah tepat, proses penentuan sasaran nya yaitu kami membuat rapat, di rapat kami membahas apa yang harus dibuat dalam Kampung KB, seperti di Kampung KB kan ada program nya BKB, BKR, BKL dan Pik R, setelah itu kan harus dibahas apa yang harus diperbaiki supaya sasaran nya tepat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy sudah tepat, proses penentuan sasaran nya yaitu dengan dibuatnya rapat, pada saat rapat dibahas apa yang harus dibuat dalam Kampung KB, seperti di Kampung KB ada program yang namanya BKB, BKR, BKL dan Pik R, setelah itu dibahas apa yang harus diperbaiki supaya sasaran nya tepat.

## 2. Sosialisasi Program

Asmamaw Alemayehu Shelemo menyebutkan bahwa “Sosialisasi program dalam teori Budiani menyatakan bahwa kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya”.<sup>33)</sup>

Berdasarkan observasi peneliti menunjukkan bahwa Pada hari Rabu, 07 Agustus 2024, Gampong Doy mengadakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan generasi muda (usia 13-25 tahun) dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung serba guna Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Materi nya yaitu “Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba” yang dihadiri oleh keuchik gampong Doy, Kapolsek Ulee Kareng dan Penyuluh dari BNN Kota Banda Aceh.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi sehingga masyarakat sadar akan bahaya dari narkoba, dan juga kenakalan remaja

---

<sup>33</sup> Asmamaw Alemayehu Shelemo, “Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online Di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan,” *Nucl. Phys.* 13, No. 1 (2023): 104–16.

yang dapat memicu generasi muda terjerat pada penyalahgunaan Narkoba. Serta sekaligus dapat membantu mengurangi peredaran narkoba ataupun obat-obatan terlarang lainnya.

### Gambar 4.6

#### Sosialisasi Bahaya Narkoba



Sumber : Gampong Doy, 2024

Adapun sosialisasi dari Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) ini sebagaimana dalam hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kesejahteraan menjelaskan bahwa “Untuk sosialisasi program menggunakan Baliho, Media sosial, dan juga ada pertemuan-pertemuan setiap bulan yang dilakukan oleh pokja”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sosialisasi program yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Baliho, selain itu juga diberitahukan melalui Media sosial, dan juga diadakan pertemuan-pertemuan setiap bulan kepada masyarakat di Gampong Doy yang dilakukan oleh pokja supaya masyarakat di Gampong Doy mengetahui langsung program Kampung Kb yang ada di Gampong Doy.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pokja Kampung KB yang menjelaskan juga bahwa “Kalau sosialisasinya kami di setiap dusun itu ada anggotanya, setiap bulan mereka

kerumah untuk mensosialisasikan tentang program Kampung Keluarga Berkualitas”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kader Kampung KB menjelaskan bahwa

“Aparatur desa itu mengundang dari narasumber BKKBN itu langsung datang ke gampong untuk memberikan sosialisasi dan mengundang masyarakat, akan tetapi gampong ini mempunyai 4 dusun, seperti di Dusun Adee ni mayoritas 80% Pegawai Negeri, jadi untuk datang sosialisasi paling 10 % selebihnya gak datang. Makanya untuk dibidang sosialisasi gak menyeluruh seluruh dusun itu dapat dijangkau sosialisasinya, kecuali mereka mendapatkan informasi setelah kader-kadernya turun ke setiap rumah untuk memperkenalkan bahwa di Gampong Doy ini ada Kampung KB, dan tidak ada kriteria khusus dalam mengikuti program ini”.

Adapun sosialisasi dari Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) sebagaimana dalam hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat AR yang menjelaskan bahwa “Kita tau nya dari perangkat desa dan kita pun juga mengetahui dari kader-kader yang diutuskan oleh BKKBN Kecamatan yg turun ke desa, mereka yang mendatangi langsung kerumah”. Kemudian Masyarakat NU juga menjelaskan bahwa “Saya tau nya dari pokja dan kader, kami dusuruh datang untuk mengikuti program nya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai sosialisasi program yang dilakukan oleh pokja, ternyata di setiap dusun itu ada anggotanya, anggota di setiap dusun lah yang melakukan sosialisasi kerumah-rumah, setiap bulan mereka kerumah-rumah untuk mensosialisasikan tentang KB.

### **3. Pencapaian Tujuan Program**

Asmamaw Alemayehu Shelemo menyebutkan bahwa “Pencapaian tujuan program dalam teori Budiani menyatakan bahwa sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses”.<sup>34)</sup>

Adapun pencapaian tujuan dari Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) sebagaimana dalam hasil wawancara penulis dengan Kasi Kesejahteraan sebagai salah satu informan menjelaskan bahwa:

“Kalau pencapaian program nya dengan dilihat perkembangan ekonomi terjadi perubahan, jadi untuk melihat pencapaian program dengan melihat tujuan awalnya, tujuan awalnya kan meningkatkan kualitas masyarakat nya baik itu SDM, Keterampilan dan Keahliannya, kemudian meningkatkan Kesejahteraannya jadi secara kualitas nya ada kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dan sudah menjalin pelatihan, alhamdulillah berjalan dan tujuan program nya dikatakan berhasil”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian program dari perkembangan ekonomi sudah terjadi perubahan, sesuai dengan dilihat dari tujuan awal, yaitu dengan meningkatkan kualitas masyarakat nya baik itu SDM, Keterampilan dan Keahliannya, kemudian meningkatkan Kesejahteraan sehingga secara kualitas nya ada kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dan sudah menjalin pelatihan, oleh karena nya tujuan program ini dikatakan berhasil.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pokja Kampung KB yang menjelaskan juga bahwa “Tujuan nya udah sampai kisaran 70% yang udah tercapai, selebihnya tinggal di lengkapi saja”.

Adapun perubahan setelah mengikuti Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) sebagaimana dalam hasil wawancara penulis dengan Masyarakat AR yang menjelaskan bahwa “Untuk perubahan saya merasakan adanya perubahan, misalnya kalau dulu tidak ada program Kampung KB jadi kualitas hidup kurang bagus”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan dari program nya udah sampai kisaran 70% yang udah tercapai, dan

---

<sup>34</sup> Shelemo, “Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online Di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.” 2023.

untuk selebihnya tinggal di lengkapi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

#### 4. Pemantauan Program

Asmamaw Alemayehu Shelemo menyebutkan bahwa “Pemantauan program dalam teori Budiani menyatakan bahwa dalam pemantauan meliputi berbagai tindakan mengecek maupun membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan”.<sup>35)</sup>

Adapun pencapaian pemantauan dari Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) sebagaimana dalam hasil wawancara penulis dengan Kasi Kesejahteraan sebagai salah satu informan menjelaskan bahwa

“Untuk pemantauan pada saat pertemuan-pertemuan rutin 3 bulan sekali atau setahun 2 kali itu kita menerima aspirasi, kendala dan menanyakan progres atau apa yang sudah dikembangkan dan apa yang menjadi kendala dalam program Kampung KB, dan disitulah kita melihat pemantauannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dilakukannya pemantauan pada saat pertemuan-pertemuan rutin 3 bulan sekali atau setahun 2 kali, pada saat itulah diterima aspirasi serta kendala dan menanyakan progres atau apa yang sudah dikembangkan atau apa yang menjadi kendala dalam program Kampung KB, dan pada saat itulah dilihat pemantauannya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pokja Kampung KB yang menjelaskan juga bahwa “Pemantauannya ada per dusun, yang membantu kami kader kampung KB dalam pemantauan, mereka menyampaikan pada saat pemantauan apa yang harus dibuat supaya Kampung KB ini dari yang tidak baik menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauannya ada per dusun, yang membantu kader kampung KB dalam pemantauan, mereka menyampaikan pada saat pemantauan apa yang harus

---

<sup>35)</sup> Shelemo. “Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online Di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.” 2023.

dibuat supaya Kampung KB ini dari yang tidak baik menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi.

#### 4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

### Gambar 4.7

#### Regulasi

##### Pasal 20

- (1) Pokja Kampung Keluarga Berkualitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit melakukan kegiatan:
- a. penyusunan rencana kerja masyarakat;
  - b. pelaksanaan rencana kerja masyarakat;
  - c. Pemantauan dan Evaluasi; dan
  - d. pencatatan dan Pelaporan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas.

Sumber : Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

#### 1. Penyusunan

Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dijelaskan bahwa penyusunan rencana kerja masyarakat dilakukan dengan cara pemetaan masalah atau potensi, penentuan prioritas masalah dan penetapan rencana kerja masyarakat. Kasi Kesejahteraan menjelaskan bahwa “Penyusunan kita ada tim, penyusunan Kampung KB ini ikut dalam perencanaan desa, kemudian setelah itu kita masukan juga perencanaan Kampung KB, setelah itu kita sosialisasikan kepada pokja nya Kampung KB”.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan diatas bahwa dalam Penyusunan nya mempunyai tim, penyusunan Kampung Keluarga Berkualitas ini ikut dalam perencanaan desa, dalam perencanaan desa juga dimasukan perencanaan Kampung KB, setelah itu dilakukan sosialisasi kepada pokja nya Kampung Keluarga Berkualitas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pokja Kampung KB yang menjelaskan juga bahwa:

“Kami mempunyai Petugas Lapangan Keluarga Berkualitas (PLKB) yang dari kecamatan Ulee Kareng, jadi mereka yang membuat program nya, apakah buat diawal tahun atau di akhir tahun setelah itu kami di panggil, pada saat dipanggil dibuatlah program apa pada saat rapat tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di Gampong Doy mempunyai PLKB yang dari kecamatan Ulee Kareng, jadi mereka yang membuat program, apakah buat diawal tahun atau di akhir tahun, setelah itu baru para Pokja dikumpulkan, dan pada saat itulah dibuat program apa-apa saja pada saat rapat tersebut.

## **2. Pelaksanaan**

Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rencana kerja masyarakat dilakukan dengan cara rapat koordinasi, sosialisasi kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Adapun Kasi Kesejahteraan juga menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaannya sesuai dengan poksinya, jadi program Kampung KB ini disusun di perencanaan desa, kemudian akan dimasukkan apa-apa yang harus dibutuhkan dalam program KB setelah itu kolaborasi dengan desa, yaitu desa yang mengeluarkan dana untuk program KB, jadi setelah disusun perencanaan untuk Kampung KB dengan dana yang tersedia, mungkin tidak semua terserap program Kampung KB di tahun ini misalnya ada program 5 yang dimintak oleh para pokja nya, ternyata yang tersedia ada 2, maka yang 2 program ini kita laksanakan dulu”.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan diatas bahwa dalam pelaksanaannya sesuai dengan kelompok fungsi (poksi), jadi program Kampung KB ini disusun di musyawarah desa, kemudian akan dimasukkan apa-apa yang harus dibutuhkan dalam program KB, setelah itu baru kolaborasi dengan desa, yaitu desa yang mengeluarkan dana untuk program KB, karena sumber dana dari program KB ini ada 2 yaitu dari dana desa dan juga dari pihak ketiga yaitu pihak BKKBN jadi setelah disusun

perencanaan untuk Kampung KB dengan dana yang tersedia, tidak semua terserap program Kampung KB.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pokja Kampung KB yang menjelaskan juga bahwa “Pelaksanaannya tergantung poksi nya masing-masing, misalnya lebih berat ke remaja, jadi tugas bagian remaja yang harus dibenahi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaannya tergantung dari poksi nya masing-masing, hal ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan yang menyampaikan juga pelaksanaannya sesuai dengan poksinya.

### **3. Pemantauan dan Evaluasi**

Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dijelaskan bahwa pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pokja Kampung KB menjelaskan bahwa “Pemantauannya ada di setiap dusun membantu kami, yaitu kader kampung KB Gampong Doy pada saat pemantauan, mereka menyampaikan pada saat pemantauan apa yang harus dibuat supaya Kampung KB ini dari yang tidak baik menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi”.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pokja Kampung KB diatas bahwa pemantauan dilakukan di setiap dusun, dan dibantu oleh kader kampung KB Gampong Doy yang membantu dalam pemantauan, mereka menyampaikan pada saat pemantauan apa yang harus dibuat supaya Kampung KB ini dari yang tidak baik menjadi lebih baik.

#### 4. Pelaporan

Dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dijelaskan bahwa pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga berkualitas secara periodik oleh penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasi Kesejahteraan bahwa:

“Jadi yang membuat laporan tentang perkembangan itu pokja dan dilaporkan kepada desa kemudian desa melaporkan ke pihak BKKBN, kalau di pihak gampong hanya menerima laporan dari pengeluaran dana, karena sumber dana dari program KB ini ada 2 yaitu dari dana desa dan juga dari pihak BKKBN sebagai mitra kerja kita. Dokumentasi adalah laporan yang paling intinya, kalau pertanggung jawabannya lebih ke dokumentasi, itu kalau kegiatannya tanpa menggunakan anggaran, karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan anggaran seperti rapat dan kemudian ada pembinaan yang tidak selalu menggunakan anggaran, itu laporannya dokumentasi, Untuk pelaporan segala format yang telah ditentukan contoh kehamilan dan kematian itu ada di ruangan Data ku, jadi setiap tahun kita update, itu bukti laporannya”.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan di atas bahwa yang membuat laporan tentang perkembangan itu pokja dan dilaporkan kepada desa kemudian desa melaporkan ke pihak BKKBN, dari pihak gampong hanya menerima laporan dari pengeluaran dana, karena sumber dana dari program KB ini ada 2 yaitu dari dana desa dan juga dari pihak BKKBN sebagai mitra kerja. Dokumentasi adalah laporan yang paling intinya, karena pertanggung jawaban lebih ke dokumentasi, dan itu kalau kegiatannya tanpa menggunakan anggaran, karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan anggaran seperti rapat dan kemudian ada pembinaan yang tidak selalu menggunakan anggaran, itu laporannya dokumentasi, Untuk pelaporan segala format yang telah ditentukan contoh kehamilan dan kematian itu ada di ruangan Data ku, setiap tahun di update, semua itulah yang menjadi bukti laporan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pokja Kampung KB yang menjelaskan juga bahwa “Kami untuk pelaporan ada yang memakai manual, ada juga yang memakai digital, jadi setiap ada kegiatan apapun di Gampong doy selalu di update di operator Kampung KB”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pelaporan ada yang memakai manual, ada juga yang memakai digital, sehingga setiap ada kegiatan yang diselenggarakan di Gampong doy selalu di update di operator Kampung KB.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh**

Kegiatan peningkatan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), dan UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa dan meningkatkan akseptor KB.

Berdasarkan observasi peneliti lapangan menunjukkan bahwa Kamis, 29 Agustus 2024 kader posyandu lansia dan Petugas kesehatan dari Puskesmas Ulee Kareng yang sedang melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia di Masjid Sabilil Jannah.

Kegiatan posyandu kali ini meliputi: penyuluhan kesehatan, senam lansia dan screening lansia (pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan gula darah) yang dihadiri oleh lebih dari 50 lansia dari 4 dusun yang ada di Gampong Doy.

Analisis dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang terdapat dalam gambar 4.5 yaitu:

1. Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Terintegrasi Dengan Posyandu

Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Terintegrasi dengan Posyandu dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Januari,

Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini di pandu oleh Kader BKB.

2. Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Terintegrasi Dengan Posyandu

Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Terintegrasi dengan Posyandu dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini di pandu oleh Kader BKL.

3. Festival Anak Sholeh II (PIK R/M)

Kegiatan Festival Anak Sholeh II (PIK R/M) dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan April yang di pandu oleh Remaja Mesjid Sabilil Jannah.

4. Kegiatan Kelompok Kerja Di Kampung KB

Kegiatan Kelompok Kerja Di Kampung KB dilaksanakan setiap satu tahun enam kali, yaitu pada bulan Februari, Mei, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kegiatan ini di pandu oleh DPKAP2KB.

5. Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan

Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan dilaksanakan setiap satu tahun tujuh kali, yaitu pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kegiatan ini di pandu oleh DPKAP2KB.

6. Kegiatan Penyuluhan Pola Asuh Anak Remaja

Kegiatan Penyuluhan Pola Asuh Anak Remaja dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan Mei yang di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

7. Kegiatan Rembuk Stunting

Kegiatan Rembuk Stunting dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

8. Kegiatan Pelatihan Fardhu Kifayah

Kegiatan Pelatihan Fardhu Kifayah dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan September. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

9. Pembangunan/Pemeliharaan Drainase Gampong

Pembangunan/Pemeliharaan Drainase Gampong dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan Oktober. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

10. Peningkatan Badan Jalan Gampong

Peningkatan Badan Jalan Gampong dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan September. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

11. Penanganan Covid-19

Penanganan Covid-19 dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

12. Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini di pandu oleh Pemerintah Gampong Doy.

13. Pelatihan Seni Tari Bagi Anak-Anak Gampong Doy

Pelatihan Seni Tari Bagi Anak-Anak Gampong Doy dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kegiatan ini di pandu oleh PKK Gampong Doy (Pokja II).

Kegiatan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dilaksanakan berbagai kegiatan di Gampong Doy dilaksanakan secara terorganisasi dan rutin sepanjang tahun.

Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terintegrasi dengan Posyandu, Penanganan Covid-19, Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta Pelatihan Seni Tari dilakukan setiap bulan. Festival Anak Sholeh II (PIK R/M) dilaksanakan setahun sekali pada bulan April oleh Remaja Masjid, sementara Kelompok Kerja Kampung KB dan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan masing-masing diadakan enam dan tujuh kali setahun.

Kegiatan tahunan lainnya, seperti Penyuluhan Pola Asuh Anak Remaja, Rembuk Stunting, Pelatihan Fardhu Kifayah, Pembangunan Drainase, dan Peningkatan Badan Jalan, dilaksanakan sesuai jadwal pada bulan tertentu oleh Pemerintah Gampong dan pihak terkait lainnya.

Semua kegiatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini di pandu oleh Kader BKB, Kader BKL, Remaja Masjid Sabilil Jannah, DPKAP2KB, Pemerintah Gampong Doy, PKK Gampong Doy (Pokja II).

Dalam penelitian efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dapat dilihat dengan menggunakan 4 indikator menurut dari Budiani yaitu Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program dan Pemantauan Program. Adapun indikator nya sebagai berikut:

#### **1. Ketepatan Sasaran Program**

Ketepatan sasaran dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy sudah tepat, dalam proses penentuan sasaran diadakan rapat dalam MusDes yang melibatkan para disabilitas kemudian para yang ekonominya lemah dan ibu-ibu yang mempunyai keahlian khusus, dikumpulkan dalam Musyawarah Desa atau yang disebut dengan Musyawarah Desa. Pada saat Musyawarah Desa dibahas tentang penentuan sasaran supaya sasaran programnya tepat sasaran.

Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy sudah tepat, proses penentuan sasaran nya yaitu dengan dibuatnya rapat, pada saat rapat dibahas apa yang harus dibuat dalam Kampung KB, seperti di Kampung KB ada program yang namanya BKB, BKR, BKL dan Pik R,

setelah itu dibahas apa yang harus diperbaiki supaya sasaran nya tepat, hal ini sesuai dengan teori efektivitas.

## **2. Sosialisasi Program**

Dalam sosialisasi program yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Baliho, selain itu juga diberitahukan melalui Media sosial, dan juga diadakan pertemuan-pertemuan kepada masyarakat di Gampong Doy yang dilakukan oleh pokja supaya masyarakat di Gampong Doy mengetahui langsung program Kampung Kb yang ada di Gampong Doy.

Mengenai sosialisasi program yang dilakukan oleh pokja, ternyata di setiap dusun itu ada anggotanya, anggota di setiap dusun lah yang melakukan sosialisasi kerumah-rumah, setiap bulan mereka kerumah-rumah untuk mensosialisasikan tentang KB.

Dengan adanya anggota di setiap dusun dapat membantu pokja untuk sosialisasi di masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di setiap dusun bisa mengetahui program kampung KB secara merata, hal ini sesuai dengan teori pelayanan konsep pembinaan.

Berdasarkan observasi peneliti menunjukkan bahwa Pada hari Rabu, 07 Agustus 2024, Gampong Doy mengadakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan generasi muda (usia 13-25 tahun) dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung serba guna Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Materi nya yaitu “Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba” yang dihadiri oleh keuchik gampong Doy, Kapolsek Ulee Kareng dan Penyuluh dari BNN Kota Banda Aceh.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi sehingga masyarakat sadar akan bahaya dari narkoba, dan juga kenakalan remaja yang dapat memicu generasi muda terjerat pada penyalahgunaan Narkoba. Serta sekaligus dapat membantu mengurangi peredaran narkoba ataupun obat-obatan terlarang lainnya

## **3. Pencapaian Tujuan Program**

Pencapaian program nya dengan dilihat dari perkembangan ekonomi sudah terjadi perubahan, jadi sesuai dengan dilihat dari tujuan awalnya, yaitu

tujuan awalnya dengan meningkatkan kualitas masyarakat nya baik itu SDM, Keterampilan dan Keahliannya, kemudian meningkatkan Kesejahteraan sehingga secara kualitas nya ada kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dan sudah menjalin pelatihan, oleh karena nya tujuan program ini dikatakan berhasil.

Tujuan dari program nya udah sampai kisaran 70% yang udah tercapai, dan untuk selebihnya tinggal di lengkapi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan pencapaian program nya dapat dilihat dari perkembangan ekonomi sudah terjadi perubahan, jadi sesuai dengan dilihat dari tujuan awalnya, yaitu tujuan awalnya dengan meningkatkan kualitas masyarakat nya baik itu SDM, Keterampilan dan Keahliannya, hal ini sesuai dengan konsep kesejahteraan.

#### **4. Pemantauan Program**

Dengan dilakukannya pemantauan pada saat pertemuan-pertemuan rutin 3 bulan sekali atau setahun 2 kali, pada saat itulah diterima aspirasi serta kendala dan menanyakan progres atau apa yang sudah dikembangkan atau apa yang menjadi kendala dalam program Kampung KB, dan pada saat itulah dilihat pemantauannya, sehingga dari hasil pemantauan akan di evaluasi kembali supaya program dari kampung KB bisa berjalan program nya dengan maksimal.

Pemantauannya ada di setiap dusun yang membantu dalam pemantauan, mereka menyampaikan pada saat pemantauan apa yang harus dibuat supaya Kampung KB ini dari yang tidak baik menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi.

Adanya evaluasi supaya program dari kampung KB di Gampong Doy bisa dilaksanakan dengan baik, dan masyarakat yang mengikuti program juga merasa nyaman dalam menjalani program dari kampung KB yang ada di Gampong Doy. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas.

#### **4.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh**

##### **1. Penyusunan**

Dalam proses penyusunannya, terdapat tim yang bertanggung jawab. Penyusunan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) ini menjadi bagian dari perencanaan desa, di mana perencanaan Kampung KB juga dimasukkan dalam rencana desa. Setelah itu, dilakukan sosialisasi kepada kelompok kerja (pokja) Kampung Keluarga Berkualitas.

Gampong Doy memiliki PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dari kecamatan Ulee Kareng. Mereka menentukan apakah penyusunan dilakukan di awal atau akhir tahun. Setelah itu, kelompok kerja (pokja) dikumpulkan, dan program-program yang akan dijalankan dibahas serta dirancang dalam rapat. Semua ini dilakukan sesuai dengan regulasi Kampung KB.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan poksinya, program Kampung KB disusun di perencanaan desa, kemudian akan dimasukkan apa-apa yang harus dibutuhkan dalam program KB, setelah itu baru kolaborasi dengan desa yaitu desa yang mengeluarkan dana untuk program KB, jadi setelah disusun perencanaan untuk Kampung KB dengan dana yang tersedia.

Dalam pelaksanaan tidak semua terserap program Kampung KB dalam setahun, misalnya ada program 5 yang dimintak oleh para pokja nya, akan tetapi yang tersedia cuman 2, maka yang 2 ini yang laksanakan dulu. Pelaksanaannya tergantung dari poksi nya masing-masing. Hal ini sesuai dengan regulasi Kampung KB.

## 3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan Anya - ada A setiap RduSun yang membantu dalam pemantauan, mereka menyampaikan pada saat pemantauan apa yang harus dibuat supaya Kampung KB ini dari yang tidak baik menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan regulasi Kampung KB.

## 4. Pelaporan

Pembuatan laporan tentang perkembangan itu pokja dan dilaporkan kepada desa kemudian desa melaporkan ke pihak BKKBN, dari pihak gampong hanya menerima laporan dari pengeluaran dana, karena sumber

dana dari program KB ini ada 2 yaitu dari dana desa dan juga dari pihak ketiga yaitu pihak BKKBN sebagai mitra kerja.

Dokumentasi adalah laporan yang paling intinya, karena pertanggung jawaban lebih ke dokumentasi, dan itu kalau kegiatannya tanpa menggunakan anggaran, karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan anggaran seperti rapat dan kemudian ada pembinaan yang tidak selalu menggunakan anggaran, itu laporannya dokumentasi, Untuk pelaporan segala format yang telah ditentukan contoh kehamilan dan kematian itu ada di ruangan Data ku, setiap tahun di update, semua itulah yang menjadi bukti laporan.

Untuk pelaporan ada yang memakai manual, ada juga yang memakai digital, sehingga setiap ada kegiatan yang diselenggarakan di Gampong doy selalu di update di operator Kampung KB. Hal ini sesuai dengan regulasi Kampung KB.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terbatasnya pelaksanaan program Kampung KB di Gampong Doy yaitu terkait dengan minimnya dana yang tersedia, sehingga program Kampung KB yang dilaksanakan dalam setahun masih ada beberapa program yang belum terselenggarakan dengan semestinya. Pelaksanaan program hanya beberapa saja sesuai dengan dana yang ada, akan tetapi pelaksanaan dari program Kampung Keluarga Berkualitas di Gampong Doy sudah mencapai kategori efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengukuran indikator efektivitas, yaitu indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program.
2. Penyusunan dan pelaporan programnya sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk pelaporan memakai manual, ada juga yang memakai digital, sehingga setiap ada kegiatan yang diselenggarakan di Gampong Doy selalu di update di operator Kampung KB. Oleh karena itu penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

#### **5.2 Saran**

1. Bagi yang melaksanakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Gampong Doy untuk dapat melaksanakan semua program yang ada, supaya masyarakat yang lain juga bisa merasakan program dari Kampung Keluarga Berkualitas di Gampong Doy.
2. Bagi pokja kampung KB di Gampong Doy untuk melakukan sosialisasi di setiap rumah-rumah yang jauh dari kantor keuchik supaya program kampung KB ini dapat diketahui oleh masyarakat yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- alfathir, Muhammad., Khairulyadi, And Firdaus Mirza. *“Kampung Kb Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penduduk (Studi Di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* Volume.7, (2022): Fisip, Usk.
- Alkahfi Ersanda. *“Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas Tarandam Guna Menciptakan Keluarga Mandiri Di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat,”* 2016, 1–23.
- Amalia, Vika. *“Efektivitas Program Kampung Kb Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,”* 2022.
- Andriani, Dessi. *“Pengaruh Pembinaan, Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Paud Kec. Talang Kelapa.” Pernik : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, No. 1 (2019): 38–52.
- Angliawati, Ria Yuli. *“Peran Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Theoretical Review.” Ecodemica* Iv, No. 2 (2016): 203–13.  
[Http://Ejournal](http://ejournal)
- Batubara, Alex Sihol, Ali Yusri, And Abdul Sadad. *“Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru.” Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik* 9, No. 1 (2024): 53–61.
- Dwikusmana, Muhammad Reza. *“Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh.” (Doctoral Dissertation, Ipdn),* 2023.
- Erwin Apriani, Nina Damayati Dan Muhamad Idris. *“Efektivitas Program Kampung Kb Di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin”* 6, No. 1 (2021): 38–45.
- Gladys Nurcintami, Dr. Dahlawi, M.Si, Mukhrijal, S.Ip., M.Ip. *“Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh”* 07, No. 03 (2022).
- Juliarta, I Wayan Sentanu. *“Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Kb Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rejasa”* 10, No. 3 (2022): 224–32.
- Lumendek, Dina Anike, Alfa Fadhila, Ode Kurniawan, Jimmy Slamet Basuki, Yosua Arya Okta Pratama, And Daru Purnomo. *“Pendampingan*

*Masyarakat Dalam Meningkatkan Umkm Dan Pembenahan Sarana Adminisratif Rumah Dataku Di Kampung Keluarga Berkualitas (Kb) 'Melati' Kelurahan Blotongan Kota Salatiga." Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, No. 3 (2021): 460–73.*

Medaline, Onny. "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah." *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, No. 2 (2017): 142–53.

Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (2020): 145–51.

Ngemplak, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Delta Lucyanita, And Gerry Katon Mahendra. "Journal Of Social And Policy Issues Analisis Implementasi Kampung Kb ( Keluarga Berkualitas ) Di Kalurahan Bimomartani ," 1 (2024): 0–4.

Nisrima, Siti, Muhammad Yunus, And Erna Hayati. "Pembinaan Perilaku Sosial Remaja Penghuni Yayasan Islam Media Kasih Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, No. 1 (2016): 192–204.

Nurbalqis, Aulia, Jamhur Poti, And Rudi Subiyakto. "Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, No. 3 (2023): 109–16.

Pangkey, Tesalonika Syela Maleke Masje, And Deysi Tampongangoy. "Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan" *Viii*, No. 2 (2022): 105–14.

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Probolinggo." *Journal Geej* 7, No. 2 (2020): 513–22.

Purnamawati, Diah, Hirshi Anadza, And Suyeno. "Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)." *Jurnal Respon Publik* 16, No. 6 (2022): 11–18.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018): 81.

Shelemo, Asmamaw Alemayehu. "Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online Di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan." *Nucl. Phys.* 13, No. 1 (2023): 104–16.

Soraya, Tania, And Puji Astuti. "Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online Di Kabupaten Pati." *Journal Of Politic And Government Studies* 8, No. 4 (2019): 61–70.

Sutarni. "Efektivitas Program Kampung Kb (Keluarga Berencana) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Dusun Borong Ampirie Desa Kalobbake Camatan Tellulimpoe," 2020.

Trisnawati, Euis. "Efektifitas Program Rehabilitasi Sosial Di Balai Pemulihan Dan Pengembangan Sosial (Bp2s) Provinsi Banten," 2016.

Widayat, Aditya Putra, Moh. Aris Munandar, And Slamet Sumarto. "Kinerja Birokrasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Dengan Aplikasi Quick Response Dan Web Di Kantor Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang." *Unnes Political Science Journal* 1, No. 2 (2017): 99–106.

Widyastuti, Astriana. "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, No. 1 (2012): 1–11.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 843.4/2879/SJ Tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan dan Kependudukan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

### **A. Pertanyaan untuk Kasi Kesejahteraan dan Pokja Kampung KB di Gampong Doy**

1. Bagaimana proses penentuan sasaran dalam program Kampung Keluarga Berkualitas di desa ini?
2. Bagaimana cara pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai program Kampung Keluarga Berkualitas kepada masyarakat?
3. Sejauh mana program ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan?
4. Bagaimana cara pemantauan program Kampung Keluarga Berkualitas di desa ini dilakukan?
5. Bagaimana proses penyusunan rencana kerja masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas di desa ini?
6. Bagaimana pelaksanaan rencana kerja masyarakat yang telah disusun dalam program Kampung Keluarga Berkualitas di desa ini?
7. Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di desa ini?
8. Bagaimana sistem pelaporan kegiatan yang dilakukan dalam Kampung Keluarga Berkualitas di desa ini?

### **B. Pertanyaan untuk Masyarakat di Gampong Doy**

1. Sejauh mana Anda merasa bahwa program ini tepat sasaran dalam memberikan manfaat kepada keluarga di kampung Anda?
2. Bagaimana Anda mengetahui tentang keberadaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB)?
3. Apa perubahan positif yang Anda rasakan setelah pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di lingkungan Anda?
4. Apakah Anda merasa bahwa program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dipantau dengan baik selama pelaksanaannya?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 2 : Surat Keputusan



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1819/Un.08/FISIP/Kp.07.6/09/2024**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **13 September 2024**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara:  
**Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.**  
 Untuk membimbing skripsi:  
 Nama : **Rahmad Zuliansyah**  
 NIM : **200802046**  
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**  
 Judul : **Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh**

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 24 September 2024  
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,

**MUJI MULIA**

**AR-RANIRY**

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan



Wawancara dengan Pokja Kampung KB



Wawancara dengan kader Kampung KB Sekaligus sebagai Masyarakat AR



Wawancara dengan Masyarakat NU



## Lampiran 4 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 Jalan Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon: 0651-7552921, 7551857; Fax. 0651-7552922  
 Website: [www.fisip.uin-ar-raniry.ac.id](http://www.fisip.uin-ar-raniry.ac.id) e-mail: [fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:fisip@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-1889/Un.08/FISIP/PP.00.9/10/2024 04 Oktober 2024  
 Lamp. : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Yth. Kepala Desa Gampong Doy  
 Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh  
 di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu kami mohon izin mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan penelitian dan pengambilan data, adapun nama mahasiswa tersebut sebagai berikut:

Nama : Rahmad Zuliansyah  
 Nim : 200802046  
 Prodi/Semester : Ilmu Administrasi Negara / IX  
 No.Hp : 085261352575  
 Alamat : Lambhuk  
 Judul Skripsi : Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh  
 Pembimbing I : Dr. Said Amirulkamar, M.M. M. Si.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Lampiran 5 : Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan  
Kampung Kelurga Berkualitas

SALINAN



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan, diperlukan panduan yang memuat program dan kegiatan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas;

b. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berwenang untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung Keluarga Berkualitas adalah wilayah setingkat desa/kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
3. Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan dan memadukan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran,

- 3 -

- pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas terlaksana dengan baik.
4. Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Pokja Kampung Keluarga Berkualitas adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili unsur masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas yang bertugas melaksanakan penggerakan individu, keluarga, dan masyarakat.
  5. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas secara periodik oleh penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
  6. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
  7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
  8. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
  9. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
  10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh agama dan mitra pembangunan, yang terkait dengan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
  11. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memimpin unit kerja atau satuan kerja yang membidangi fungsi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
  12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  13. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

- 4 -

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan melalui:

- a. pengorganisasian pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di wilayah setingkat desa/kelurahan;
- b. fasilitasi teknis penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
- c. pengoordinasian dan peningkatan pelibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan swasta dalam penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan keluarga dan penguatan institusi keluarga;
- d. pengoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- e. pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah setingkat desa/kelurahan;
- f. pengukuran keberhasilan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan Indeks Pembangunan Keluarga setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 3

(1) Program optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas meliputi:

- a. penyediaan data dan dokumen kependudukan;
- b. penguatan advokasi dalam gerakan masyarakat hidup sehat dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
- c. peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bersumber daya masyarakat;
- d. pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian *stunting*; dan
- e. pemberdayaan ekonomi keluarga.

(2) Program optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pada Kampung Keluarga Berkualitas.

- 5 -

BAB II  
PENGORGANISASIAN KAMPUNG KELUARGA  
BERKUALITAS

Pasal 4

Pengorganisasian Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan melalui pembentukan:

- a. tim kerja; dan
- b. tim koordinasi.

Pasal 5

(1) Tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas BKKBN tingkat pusat; dan
- b. tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas perwakilan BKKBN provinsi.

(2) Struktur tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. tim pengarah:
  1. ketua; dan
  2. anggota.
- b. tim pelaksana:
  1. ketua;
  2. wakil ketua;
  3. sekretaris; dan
  4. bidang-bidang, meliputi:
    - a) penyediaan data keluarga dan pelayanan dokumen kependudukan;
    - b) perubahan perilaku keluarga;
    - c) peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
    - d) peningkatan sumber daya manusia; dan
    - e) peningkatan advokasi, pergerakan, komunikasi, informasi, dan edukasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan memadukan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

جامعة الزاوية

Pasal 6

(1) Tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas BKKBN tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari unit kerja BKKBN.

(2) Tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas BKKBN tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN.

Pasal 7

(1) Tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas perwakilan BKKBN provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

- 6 -

- ayat (1) huruf b terdiri dari unit kerja perwakilan BKKBN provinsi.
- (2) Tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas perwakilan BKKBN provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

#### Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. Tim Koordinasi nasional;
  - b. Tim Koordinasi tingkat provinsi; dan
  - c. Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota.
- (2) Struktur Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. tim pengarah:
    1. ketua; dan
    2. anggota.
  - b. tim pelaksana:
    1. ketua;
    2. wakil ketua;
    3. sekretaris;
    4. bidang-bidang, meliputi:
      - a) penyediaan data keluarga dan pelayanan dokumen kependudukan;
      - b) perubahan perilaku keluarga;
      - c) peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
      - d) penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.

#### Pasal 9

Pembentukan dan mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

#### Pasal 10

- Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah setingkat desa/kelurahan dilakukan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi;
  - b. koordinasi;
  - c. penetapan kebijakan;
  - d. penyiapan sumber daya manusia; dan
  - e. pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 11

Sosialisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi kepada:

- 7 -

- a. kementerian/lembaga;
  - b. perangkat daerah; dan
  - c. desa/kelurahan,
- terkait pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 12

Penetapan kebijakan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan lokus pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dan/atau kebijakan lain terkait penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 13

Penyiapan sumber daya manusia Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. Penyuluh KB dan PLKB;
- b. petugas lapangan keluarga berencana non-ASN;
- c. pendamping desa;
- d. bidan desa; dan/atau
- e. kader lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan oleh kepala desa/lurah atau dengan sebutan nama lain.
- (2) Tugas Pokja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pergerakan individu, keluarga, dan masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 15

- (1) Struktur Pokja Kampung Keluarga Berkualitas paling sedikit memuat:
  - a. pengarah;
  - b. pelaksana; dan
  - c. seksi.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Keputusan kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai adanya perubahan susunan struktur dan/atau keanggotaan.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Pokja Kampung Keluarga Berkualitas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan pembekalan.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. BKKBN;

- 8 -

- b. perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan/atau keluarga berencana;
- c. Penyuluh KB dan PLKB;
- d. petugas lapangan keluarga berencana non-ASN; dan
- e. pemerintah desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lain.

#### Pasal 17

Keputusan kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan/atau keluarga berencana.

#### Pasal 18

- (1) Mekanisme pembentukan dan pelaksanaan tugas Pokja Kampung Keluarga Berkualitas ditetapkan dengan pedoman teknis penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui pemberdayaan institusi keluarga.
- (2) Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rumah data kependudukan dan informasi keluarga;
  - b. bina keluarga balita;
  - c. bina keluarga remaja;
  - d. bina keluarga lansia;
  - e. pusat informasi dan konseling remaja;
  - f. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan keluarga berencana bagi keluarga;
  - g. melakukan pembinaan posyandu;
  - h. pergerakan serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
  - i. *screening* kesehatan bagi calon pengantin;
  - j. pemberian pendampingan dan edukasi bagi calon PUS/calon pengantin selama 3 (tiga) bulan pra nikah;
  - k. pendampingan ibu hamil;
  - l. pelayanan KB pasca persalinan;
  - m. pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
  - n. peningkatan kemandirian ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor;
  - o. dapur sehat atasi *stunting*;

- 9 -

- p. pojok edukasi kependudukan di masyarakat;
  - q. kelompok keluarga berencana pria; dan
  - r. kegiatan masyarakat lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga penggerak desa/kelurahan, meliputi:
- a. Penyuluh KB, PLKB, dan penyuluh lainnya;
  - b. bidan desa;
  - c. petugas lapangan keluarga berencana non-ASN;
  - d. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - e. pendamping desa;
  - f. pendamping program/kegiatan di tingkat desa/kelurahan;
  - g. kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan; dan/atau
  - h. kader kelompok kegiatan lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Pokja Kampung Keluarga Berkualitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit melakukan kegiatan:
- a. penyusunan rencana kerja masyarakat;
  - b. pelaksanaan rencana kerja masyarakat;
  - c. Pemantauan dan Evaluasi; dan
  - d. pencatatan dan Pelaporan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Penyusunan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pemetaan masalah dan potensi;
  - b. penentuan prioritas masalah; dan
  - c. penetapan rencana kerja masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara;
- a. rapat koordinasi;
  - b. sosialisasi kegiatan; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 21

- (1) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf d dilaksanakan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh KB dan PLKB berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.
- (4) Dalam hal tidak tersedianya Penyuluh KB dan PLKB pada desa/kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas, pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh petugas yang diberi wewenang oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan/atau keluarga berencana.

- 10 -

- (5) Pencatatan dan Pelaporan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui *website* Kampung Keluarga Berkualitas <https://kampungkb.bkkbn.go.id/>.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas ditetapkan oleh Deputi.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pemantauan, dan Evaluasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan oleh:
  - a. tim kerja; dan
  - b. Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh tim kerja dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas dapat melibatkan Penyuluh KB, PLKB, dan/atau petugas lapangan keluarga berencana non-ASN sesuai dengan wilayah binaannya.

Pasal 24

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. tata kelola pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- b. pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 24 bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Pengukuran keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
  - a. indeks pembangunan keluarga; dan
  - b. indikator lainnya.

A R - R A N I R Y P a s a l 26

- (1) Tim kerja melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi secara berjenjang.
- (2) Pokja Kampung Keluarga Berkualitas melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan/atau keluarga berencana.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Penyuluh

- 11 -

KB, PLKB, dan/atau petugas lapangan keluarga berencana non-ASN sesuai dengan wilayah binaannya.

Pasal 27

Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas disampaikan dalam rapat Tim Koordinasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kampung KB yang telah terbentuk sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 30

Kelompok kerja yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1090

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Puji Matiningsih

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Rahmad Zuliansyah  
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 20 Oktober 2002  
 Nomor Handphone : 085261352575  
 Alamat : Lambhuk  
 Email : rahmadzuliansyah2002@gmail.com

### Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Lambhuk  
 Sekolah Menengah Pertama : SMPN 10 Banda Aceh  
 Sekolah Menengah Atas : SMAN 8 Banda Aceh

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : A | 2024  
 TOEFL : 400 | 2024  
 Komputer : A- | 2024  
 Magang : A | 2024